

POTRET KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI PROVINSI JAWA TIMUR



Editor:
Haidlor Ali Ahmad

**KEMENTERIAN AGAMA RI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN
JAKARTA, 2011**

Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDT)

potret kerukunan umat beragama di provinsi jawa timur / Puslitbang
Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Ed. I. Cet. 1. -----

Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011
xxii + 51 hlm; 15 x 21 cm

ISBN : 978-979-797-325-4

Hak Cipta pada Penerbit

.....
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara
apapun, termasuk dengan cara menggunakan mesin fotocopy,
tanpa izin sah dari penerbit
.....

Cetakan Pertama, Nopember 2011

.....

POTRET KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI PROVINSI JAWA TIMUR

.....
Editor:

Haidlor Ali Ahmad

Desain cover dan Lay out oleh:

Zabidi

.....

Penerbit:

Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta
Telp/Fax. (021) 3920425, 3920421

Kata Pengantar

Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Puji syukur kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, **“Penerbitan Naskah Buku Kehidupan Keagamaan”** ini akhirnya dapat diwujudkan. Penerbitan buku ini, merupakan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI pada tahun 2010. Kami menghaturkan ucapan terimakasih kepada para pakar dalam menulis prolog, juga kepada para editor buku ini yang secara tekun telah menyelaraskan laporan hasil penelitian menjadi sebuah buku yang telah diterbitkan, yang hasilnya dapat dibaca oleh masyarakat secara luas.

Pada tahun 2011 ini ditetapkan 9 (sembilan) naskah buku untuk diterbitkan, yang meliputi judul-judul buku sebagai berikut:

1. Dimensi-Dimensi Kehidupan Beragama: Studi tentang Paham/Aliran Keagamaan, Dakwah dan Kerukunan, editor: Nuhrison M. Nuh.
2. Perkembangan Paham Keagamaan Lokal di Indonesia, editor: Achmad Rosidi.
3. Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia, editor: Ahmad Syafi'i Mufid.
4. Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama, editor: Kustini.
5. Kepuasan Jamaah Haji terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadat Haji Tahun 1430 H/2009 M, editor: Imam Syaukani.
6. Bantuan Sosial Kementerian Agama RI bagi Rumah Ibadat dan Ormas Keagamaan, editor: Muchit A Karim.

7. Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia (Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006), editor: M. Yusuf Asry.
8. Potret Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Timur, editor: Haidlor Ali Ahmad.
9. Islam In A Globalized World, penulis M. Atho Mudzhar.

Untuk itu, kami menyampaikan terimakasih setinggi-tingginya kepada para peneliti yang telah “merelakan” karyanya untuk kami terbitkan, serta kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi terlaksananya program penerbitan naskah buku kehidupan keagamaan ini. Semoga penerbitan karya-karya hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah sosial keagamaan, serta ikut memberikan pencerahan kepada masyarakat secara lebih luas tentang pelbagai perkembangan dan dinamika sosial keagamaan yang terjadi di Indonesia. Penerbitan buku ini dapat dilakukan secara simultan dan berkelanjutan setiap tahun, untuk memberikan cakrawala dan wawasan kita sebagai bangsa yang memiliki khasanah keagamaan yang amat kaya dan beragam.

Tentu saja tidak ada gading yang tak retak, sebagai usaha manusia, penerbitan ini pun masih menyimpan berbagai kekurangan baik tampilan dan pilihan huruf, dimana para pembaca mungkin menemukan kejanggalan dan kekurangserasian. Dalam pengetikan, boleh jadi juga ditemukan berbagai kesalahan dan kekeliruan yang mengganggu, dan berbagai kekeliruan dan kejanggalan lainnya. Untuk itu kami mohon maaf. Tetapi yakinlah, berbagai kekurangan dan kekhilafan itu bukan sesuatu yang disengaja. Itu sepenuhnya disebabkan kekurangtelitian para editor maupun tim pengetikan. Semoga berbagai kekurangan

dan kelemahan teknis itu dapat dikurangi pada penerbitan berikutnya.

Akhirnya, ucapan terimakasih kami haturkan kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang telah memberikan arahan demi tercapainya tujuan dan sasaran penerbitan naskah buku kehidupan keagamaan ini.

Jakarta, November 2011

Kepala
Puslitbang Kehidupan Keagamaan



Prof. H. Abd. Rahman Mas'ud, Ph.D
NIP. 19600416 198903 1 005

Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Dengan memuji nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, syukur alhamdulillah atas terselenggaranya penelitian mengenai Potret Kehidupan Umat Beragama di Provinsi Jawa Timur hingga tersusunnya laporan kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Penelitian ini sangat penting artinya terutama untuk mengetahui; a) Pluralisme sosial di Indonesia sebagai aset bangsa yang dapat berkontribusi positif serta negatif bagi dinamika sosial dan perwujudan kerukunan serta keutuhan bangsa; b) Nuansa agama di berbagai daerah khususnya di Jawa Timur yang kadang-kadang muncul walaupun eskalasinya relatif kecil, tidak mengancam keutuhan bangsa; c) Munculnya berbagai kasus keagamaan di masyarakat yang perlu dicari solusinya.

Situasi harmoni dan rukun umat beragama di 12 wilayah kabupaten/kota dan Jawa Timur pada umumnya, dipandang relatif kondusif. Dalam artian, sekarang ini tidak ada konflik atau benturan-benturan sosial yang bersifat terbuka. Hasil wawancara di atas, dikuatkan dengan hasil penyebaran kuesioner yang mendapatkan angka penilaian responden sebesar (3,58) dengan menggunakan skala penilaian dari 1 sampai 5, atau rentang skor antara 1-5, dapat dikategorikan berada ditingkat rukun.

Beberapa faktor yang dipandang potensial bagi upaya perwujudan kerukunan meliputi: 1) Kearifan lokal; 2) Ajaran agama dan peran para tokoh agama selaku lambang pemersatu; 3) Dukungan politis pemerintah untuk mewujudkan kerukunan; 4) Saling ketergantungan antar warga dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup keseharian; 5) Adanya forum-forum dialog multikultural lintas agama,

budaya, etnis, melalui berbagai media. Sementara aspek-aspek yang dapat mengganggu kerukunan, seperti: 1) Pembangunan dan penggunaan rumah ibadat yang tidak sesuai dengan peraturan; 2) Persaingan politik yang kurang sehat dan penyalahgunaan simbol keagamaan untuk kepentingan kelompok; 3) Perbedaan paham dan pengamalan agama yang tidak sesuai dengan kelompok arus utama; 4) Kesenjangan sosial ekonomi; 5) Perkembangan budaya global yang tidak selaras dengan kearifan lokal dan ajaran agama.

Sejumlah kasus yang pernah muncul antara lain: 1) Kasus protes dan penolakan pembangunan atau penggunaan rumah ibadat; 2) Kelompok agama yang mengusung paham yang tidak sesuai dengan paham agama kelompok arus utama; 3) Penistaan/penodaan agama; 4) Penyiaran agama yang ditujukan kepada kelompok agama, yang melibatkan massa; 6) Kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.

Langkah-langkah penyelesaian kasus konflik yang lazim dilakukan meliputi: 1) Musyawarah secara kekeluargaan antar pihak-pihak terkait; 2) Proses dialog intensif antar para tokoh keagamaan dan pemerintah; 3) Proses hukum melalui pengadilan; 4) Diserahkan pada pemerintah setempat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam menyusun kebijakan di bidang kerukunan umat beragama oleh pimpinan di lingkungan Kementerian Agama dan berbagai pihak yang berkepentingan. Selain itu, dari buku ini dapat diperoleh informasi yang jelas dan lengkap serta obyektif tentang kerukunan umat beragama yang dapat dijadikan acuan oleh pihak-pihak terkait guna mengetahui dan melihat potret kerukunan secara lebih jelas.

Banyak pihak yang memberikan kontribusi positif dalam merealisasikan buku ini, baik berupa kebijakan, dorongan spirit, pikiran dan tenaga. Untuk itu kami ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
2. Kepada tim peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
3. Berbagai pihak yang tidak mungkin kami sebutkan pada kesempatan ini.

Mudah-mudahan dengan disusunnya buku ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak umumnya dan para peneliti Badan Litbang dan Diklat khususnya.

Jakarta, November 2011



Kepala
Badan Litbang dan Diklat

Pron. Dr. H. Abdul Djamil, MA
NIP. 19570414 198203 1 003



PROLOG

Masdar Hilmy, MA., Ph.D.
Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya

Istilah “kerukunan” bukan merupakan hal baru bagi bangsa Indonesia. Ia sudah menjadi kosakata harian bagi masyarakat kita. Terutama bagi masyarakat Jawa, istilah “kerukunan” (berasal dari akar kata “rukun”) sudah menjadi bagian dari kosmologi kehidupan sehari-hari. Prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan keberadaan masyarakat yang harmonis, nir-konflik dalam pengertiannya yang “manifest”. Niels Mulder (1978; 39) mendefinisikan “rukun” sebagai “berada dalam keadaan selaras”, “tenang dan tenteram”, tanpa perselisihan dan pertentangan, “bersatu dalam maksud untuk saling membantu.”

Istilah “rukun” pertama-tama merujuk pada state of well-being, sebuah kondisi keseimbangan sosial (social equilibrium) di mana semua pihak berada dalam keadaan damai satu sama lain, suka bekerja sama, saling menerima, dalam suasana tenang dan sepakat (Magnis-Suseno; 1993, 39). Rukun adalah keadaan ideal yang diharapkan dapat dipertahankan dalam semua hubungan sosial, mulai dari unit sosial terkecil seperti keluarga, hingga unit sosial terbesar seperti negara-bangsa. Dalam konteks masyarakat Jawa, kerukunan sudah melekat sedemikian rupa menjadi semacam etika sosial (social code of conduct) yang menggerakkan, mengatur dan menggerakkan kesadaran kolektif kebanyakan masyarakat Jawa.

Jadi, kerukunan selalu terkait dengan harapan dan imajinasi akan hadirnya harmoni sosial, dimana konflik sedapat mungkin bisa dieliminasi. Dengan formulasi lain, kerukunan merupakan mekanisme kultural guna memoderasi

perbedaan dan bahkan konflik sosial. Perbedaan pandangan masyarakat yang mengarah pada konflik memang sulit dihindari, mengingat keberbedaan adalah sebuah sunnatullah. Namun, kondisi konflik itu jangan sampai merusak tatanan sosial yang dapat menghambat dan mengganggu keseimbangan sosial secara keseluruhan. Memang, perbedaan pemikiran yang mengarah pada konflik merupakan hal yang niscaya. Namun terdapat sebuah mekanisme budaya yang dapat digunakan untuk memoderasi konflik tersebut agar ia tetap laten sehingga kehadirannya tetap bisa produktif (Louis Kriesberg: 2007).

Jika kata “kerukunan” dikaitkan dengan “agama”, maka kita sebagai satu bangsa patut berbangga atas kondisi kerukunan beragama bangsa Indonesia yang sudah termasyhur di kalangan bangsa-bangsa di dunia. Kenyataan ini bisa ditilik dari tradisi “plurisentrisme keagamaan” di Indonesia sebagaimana terekam dalam naskah-naskah kuno maupun buku-buku sejarah yang menggambarkan betapa Nusantara menjadi semacam ceruk besar yang cantik (melting pot) tempat bersemayamnya berbagai paham dan ideologi keagamaan yang tetap eksis hingga sekarang ini. Kenyataan ini sudah barang tentu harus dicatat sebagai modal sosial-budaya yang akan mengantarkan bangsa ini sebagai bagian dari komunitas internasional yang menyediakan suri tauladan dalam hal kerukunan umat beragama.

Namun yang perlu digarisbawahi adalah, kondisi heterogenitas bangsa Indonesia ibarat pedang bermata ganda: di satu sisi kemajemukan bisa menjadi kekuatan konstruktif-produktif dalam rangka membangun bangsa. Hal ini bisa dilakukan ketika kita memiliki cetak-biru (blueprint) yang bisa dijadikan sebagai acuan normatif dalam mengelola heterogenitas sosial-budaya kita. Sejauh ini, Indonesia cukup teruji dalam menghadapi pelbagai rintangan dan ujian yang

dapat memrakporandakan bangunan kebangsaan kita. Kita memang patut berbangga atas prestasi yang sudah kita raih. Tetapi kita tidak boleh lengah terhadap hadirnya “tangan-tangan jahil” yang tidak menghendaki Indonesia utuh dan berjaya.

Di sisi lain, jika heterogenitas kebangsaan kita tidak bisa dikelola dengan baik, maka ia bisa menjelma menjadi kekuatan destruktif yang bisa mencabik-cabik bangunan kebangsaan yang sudah sedemikian lama terbangun di bawah panji-panji Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejarah bangsa-bangsa besar adalah sejarah manajemen kepelbagaian mereka; bagaimana mereka membangun dan mengelola kepelbagaian dari sisi ideologi keagamaan, sosial-budaya dan politik. Sebagai sebuah bangsa besar, Indonesia harus menjadikan pengalaman Uni Soviet dan Yugoslavia sebagai “kacabenggala” bagi penataan kehidupan multikulturalitas kebangsaan kita. Kehancuran kedua negara besar tersebut terletak pada ketidakmampuan mereka mengelola kepelbagaian yang ada, sehingga tiap-tiap faksi yang bertikai mengambil jalan pintas untuk memisahkan diri dari bangunan negara yang ada. Maka, jadilah sejarah Uni Soviet dan Yugoslavia sebagai puing-puing yang tidak lagi eksis di peta dunia ini.

Memang sosiologi konflik mengenal dua jenis konflik; konflik laten (soft conflict) dan konflik manifes atau konflik horizontal (hard conflict). Konflik dalam pengertian ini akan muncul ketika “two or more persons or groups manifest the belief that they have incompatible objectives” (Louis Kriesberg, 1973). Jika yang pertama mengarah pada perbedaan-perbedaan pandangan individu atau kelompok, maka yang kedua mengarah pada ketidakmampuan sebuah bangsa memoderasi perbedaan-perbedaan tersebut. Artinya, tidak selamanya konflik pasti jelek. Ada konflik-konflik yang

dibutuhkan melalui model pengelolaan konflik yang benar guna memacu produktivitas bangsa kita.

Dalam perspektif sosiologi konflik, terdapat dua nomenklatur penting terkait dengan konflik. Nomenklatur pertama adalah “manajemen konflik” (Peter Fenn & Rod Gameson, 1992; I. William Zartman, 2008) yang merujuk pada bagaimana konflik merupakan fenomena alamiah yang harus tetap dijaga dan dikelola dengan baik agar menjadi kekuatan produktif. Pandangan ini mengasumsikan bahwa konflik bisa menjadi “nutrisi” dalam pola relasi sebuah organisme sosial selama ia bisa dikelola dengan baik. Sebagaimana disinggung di atas, dalam batas-batas tertentu, konflik bisa disimulasikan dalam sebuah unit sosial untuk memacu prestasi atau kinerja seseorang atau kelompok. Dengan cara seperti ini, setiap anggota individu dalam unit tersebut selalu terpacu untuk menciptakan ruang-ruang kompetisi secara sehat.

Nomenklatur kedua adalah “resolusi konflik” (Schellenberg, 1996). Istilah ini merujuk pada situasi di mana konflik telah bereskalasi di atas permukaan. Ketika manajemen konflik sudah tidak lagi mampu mengakomodasi modus-modus pertikaian yang tidak sehat di antara anggota unit sosial, maka yang terjadi adalah membunyahnya konflik tersebut dalam bentuk benturan-benturan nyata di antara mereka. Dalam kondisi inilah sebuah unit sosial tidak lagi membutuhkan manajemen konflik, tetapi resolusi konflik yang mensyaratkan pihak-pihak yang bertikai untuk berunding dalam sebuah forum untuk merumuskan penyelesaian secara bermartabat dan menyenangkan bagi masing-masing pihak (*win-win solution*).

Pendek kata, manajemen konflik dibutuhkan dalam suasana damai, sementara itu resolusi konflik dibutuhkan ketika konflik sudah meletus. Keduanya menempati peran instrumental dalam rangka menciptakan perdamaian.

Keduanya dibutuhkan oleh bangsa ini. Sebagai bangsa yang tingkat kemajemukannya tergolong ekstrem, Indonesia menghadapi saat-saat yang rawan. Dengan lebih dari 245 juta jiwa, 300 suku, lima agama resmi, dan ratusan bahasa daerah, Indonesia memiliki tingkat kerawanan sosial yang sangat tinggi. Tingkat perbedaan yang sangat ekstrim merupakan “jerami kering” yang sewaktu-waktu bisa terbakar. Artinya, semakin ekstrim tingkat kemajemukan suatu bangsa, semakin rawan pula tingkat kerawanan sosial terhadap kemungkinan munculnya konflik. Oleh karena itu, Indonesia harus memiliki kecerdasan sosial-budaya dalam mengelola tingkat kemajemukan yang ekstrim itu.

Sebelum konstruksi manajemen dan resolusi konflik diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ada baiknya Indonesia membangun apa yang disebut sebagai “katup pengaman” (safety valve) atau “zona penyangga” (buffer zone) agar dimensi kepelbagaian bangsa tidak mengarah pada konflik horizontal. Secara makro, kerukunan beragama merupakan dimensi internal sebuah budaya masyarakat yang tidak membutuhkan justifikasi suprastruktur kenegaraan seperti keberadaan Undang-undang yang mengatur kerukunan. Kerukunan dalam pelbagai dimensinya merupakan fitur-fitur internal yang semestinya hadir dengan sendirinya di masing-masing institusi sosial-budaya yang mengandaikan hadirnya pola-relasi yang sehat di kalangan masyarakat majemuk.

Ketika sebuah institusi sosial-budaya memiliki nilai-nilai intrinsik yang bisa dipakai sebagai “katup pengaman” atau “zona penyangga,” maka kondisi kerukunan akan tercipta dengan sendirinya. Pola kerukunan semacam inilah yang diharapkan hadir dan mewujudkan dalam struktur sosial-budaya masyarakat kita, sehingga ia dapat melahirkan kerukunan autentik (authentic harmony). Sebaliknya, ketika

mereka tidak memiliki kearifan-kearifan budaya yang mempersatukan kepelbagaian dimaksud, maka ia berpotensi menciptakan gesekan-gesekan sosial yang pada gilirannya mengarah pada konflik horizontal. Dalam kondisi semacam inilah, kerukunan harus dikondisikan melalui perangkat instrumental-ekstrinsik yang memiliki daya koersi terhadap penerapannya di masyarakat. Namun, kondisi kerukunan semacam ini dikhawatirkan hanya berlangsung di tingkat permukaan saja yang hanya menciptakan kerukunan palsu (bogus/fake harmony). Jika mungkin, pola atau model kerukunan beragama di Indonesia harus ditopang oleh zona penyangga intrinsik dan ekstrinsik sekaligus.

Buku yang ada di hadapan pembaca merupakan sebuah upaya serius yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI untuk melakukan pemetaan terhadap kerukunan umat beragama di Jawa Timur, sebuah wilayah di Pulau Jawa yang paling dinamis dan heterogen dari perspektif sosial-budaya-politik. Memang Jawa Timur bukanlah Indonesia. Tetapi Jawa Timur merupakan sebuah daerah di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa, yakni 37 juta jiwa. Jumlah sebesar ini merupakan konsentrasi kerawanan sosial jika kepelbagaian masyarakat tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks inilah rasion d'etre buku ini hadir. Besar harapan, kehadiran buku ini menginspirasi penelitian-penelitian serupa di masa mendatang tentang bagaimana peta kerukunan beragama di Indonesia dipotret secara komprehensif. Walhasil, semoga kehadiran buku ini membawa manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa yang sedang merawat kebhinnekaan Indonesia. Semoga...

Surabaya, 11-11-11

Masdar Hilmy.

Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya

Daftar Rujukan

- Fenn, Peter & Rod Gameson. Construction Conflict Management and Resolution. London: E & FN Spon. , 1992
- Kriesberg, Louis. The Sociology of Conflict. London: Prentice-Hall. 1973.
- Kriesberg, Louis. Constructive Conflicts: from Escalation to Resolution. London: Rowman & Littlefield Publishers. 2007.
- Magnis-Suseno, Franz. Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa. Jakarta: Gramedia. 1993.
- Mulder, Niels. Mysticism and Everyday Life in Cotemporary Java: Cultural Persistence and Change. Singapore: Singapore University Press. 1978.
- Schellenberg, James A. Conflict Resolution: Theory, Research, and Practice. New York: State University of New York. 1996.
- Zartman, I. William, Negotiation and Conflict Management: Essays on Theory and Practice. New York: Routledge. 2008.

Prakata Editor

Pluralitas bangsa Indonesia di satu sisi merupakan aset yang sangat menarik, terutama bagi industri pariwisata. Namun di sisi lain, pluralitas tersebut jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadikan bangsa Indonesia rentan terpecah belah (*fragile nation*). Berbagai konflik yang terjadi menjelang dan sesudah runtuhnya rezim orde baru dapat dijadikan sebagai bukti kerentanan tersebut.

Untuk mengantisipasi kerentanan tersebut, pengenalan akan kondisi bangsa ini melalui hasil penelitian Potret Kerukunan Umat Beragama ini sangatlah penting. Melalui penelitian ini dapat diketahui tentang; a) Potensi kerukunan masyarakat Provinsi Jawa Timur, antara lain dari faktor budaya yang pada umumnya masyarakat Jawa Timur cenderung bersifat extrovert, memiliki tenggang rasa (*tepo saliro*) dan lebih suka menghindari konflik. Adanya dialog antar tokoh lintas agama lintas budaya sehingga membuat suasana saling memahami dan menerima perbedaan; b) Potensi konflik antara lain disebabkan oleh pendirian rumah ibadat, baik berupa rumah tinggal yang difungsikan sebagai rumah ibadat. Pendirian rumah ibadat bermasalah karena tidak sesuai dengan prosedur atau pengaturan yang telah ditentukan dalam PBM.

Dengan diketahuinya potensi konflik kerukunan dan sekaligus potensi konflik akan memudahkan bagi para pembuat kebijakan baik di lingkungan kementerian Agama dan Kementerian terkait pemeliharaan kerukunan. Agama yang dijalankan secara eksklusif jika tidak diantisipasi bukan tidak mungkin akan mengundang konflik antar agama.

Beberapa konflik pernah terjadi dalam rentang waktu antara 2000-2010, baik internal agama maupun antar agama.

Internal agama Islam diantaranya reaksi kaum Muslimin terhadap munculnya aliran-aliran menyimpang dari pandangan arus utama (mainstream). Kasus internal Kristen muncul berupa ketegangan antar gereja akibat aktivitas jemaat suatu gereja yang ditujukan kepada jemaat gereja yang lainnya.

Sedangkan kasus antar umat beragama paling sering terjadi yaitu masalah perselisihan pendirian rumah ibadat. Rumah ibadat yang hendak didirikan di suatu tempat mendapat protes pendiriannya dari warga sekitar rumah ibadat itu berada.

Sangat disadari, hasil penelitian ini masih belum sempurna baik secara metode maupun pengayaan data, sehingga sangat diperlukan penyempurnaan melalui studi lanjutan.

Mudah-mudahan buku ini mendatangkan manfaat dan dapat menjadi salah satu referensi bagi studi berikutnya mengenai Potret Kerukunan Umat Beragama di wilayah lain serta dapat memperkaya intelektualitas.

Jakarta, November 2011
Editor,

Haidlor Ali Ahmad

Daftar Isi

Kata Pengantar Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan	___ iii
Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama	___ vii
Prolog	___ xi
Prakata Editor	___ xix
Daftar Isi	___ xxi
1. Pendahuluan	___ 1
Latar Belakang Masalah	___ 1
Permasalahan	___ 3
Metode Penelitian	___ 4
Teknik Pengumpulan Data	___ 7
Pengolahan Data	___ 8
Sistematika	___ 8
2. Kerangka Konseptual	___ 9
3. Temuan Lapangan dan Pembahasan	___ 17
Kehidupan Agama dan Budaya	___ 17
Kerukunan Umat Beragama	___ 19
Potensi Kerukunan	___ 22
Potensi Konflik	___ 24
Konflik Bernuansa Agama	___ 26
Penyelesaian Kasus	___ 28
Hasil Survei	___ 32

4. Penutup	___ 49
Kesimpulan	___ 49
Rekomendasi	___ 50

Daftar Kepustakaan	___ 51
---------------------------	--------

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Secara geokultural, wilayah Negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang dihuni oleh penduduk dengan latar belakang berbagai suku bangsa, budaya, bahasa, dan agama/kepercayaan. Dengan kata lain bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki tingkat kemajemukan (pluralitas) yang tinggi, baik secara fisik maupun non-fisik.

Di satu sisi, kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang potensial bagi pencapaian cita-cita menjadi bangsa/negara yang besar dan kuat. Namun, disisi lain, kemajemukan itu dapat menjadi faktor disintegratif yang mengancam keutuhan bangsa. Untuk itu, kekayaan bangsa yang berupa kemajemukan dan perbedaan latar belakang perlu ditata, dikelola atau di-*manage* secara baik, dan proporsional, agar semua komponen bangsa ini tetap terintegrasi dalam bingkai NKRI.

Sisi negatif dari kemajemukan yang dapat menjadikan bangsa Indonesia rentan terpecah-belah (*fragile nation*) bukanlah sekedar rasa kekhawatiran yang berlebihan. Perjalan sejarah bangsa Indonesia telah berulang kali mengalami beberapa kali ujian dari sejak awal kemerdekaan hingga usia kemerdekaan bangsa ini mencapai 50 tahun lebih. Sebagaimana yang terjadi menjelang abad XXI

muncul berbagai fenomena krisis sosial yang mengarah kepada proses disintegrasi sosial di Indonesia. Diawali dengan konflik antar ras bulan Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya, disusul dengan konflik-konflik di daerah-daerah lain, konflik antar kelompok beragama, yakni peristiwa Jalan Ketapang Jakarta, kerusuhan di Kupang yang menyebar ke Ambon (Januari 1999), Ujung Pandang (1 April 1999), disusul konflik antaretnis di Sambas Kalimantan Barat 1999, konflik Poso, dan Maluku Utara. Konflik sosial yang meletus, berakar pada sumber sangat kompleks, tumpang tindih, berkelindan dan sangat sulit diidentifikasi secara jelas dan akurat. Emil Salim, mengkategorikan konflik yang terjadi di Indonesia, umumnya merupakan bentuk konflik "*dwiminoritas*" dan "*triminoritas*", lantaran terbentuk atas himpitan dua atau tiga konflik seperti antar suku dan agama, atau antar ras, suku, dan agama sekaligus (Kompas: 2009).

Terlepas dari bentuk konflik yang terjadi, faktor penyebab dan dampaknya bagi masyarakat korban konflik, ternyata konflik berkepanjangan tidak hanya berakibat semakin sulitnya dicarikan strategi pemecahannya tapi juga berdampak semakin rusaknya tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, Pemerintah dan masyarakat harus mencari solusi paling tepat untuk mengatasi konflik yang terjadi serta membangun kerukunan hidup masyarakat sehingga NKRI yang kuat dapat terus dipertahankan.

Berbagai strategi penguatan integrasi bangsa yang benar-benar "*integrated*" dan sekaligus memperkecil konflik-konflik sosial di Indonesia, memang, sudah banyak yang ditempuh. Salah satunya melalui pendekatan agama (*religious approach*) yang memfokus pada upaya pemungisian agama pada proporsi yang tepat sebagai "*social integrator*" dalam perspektif luas. Namun demikian, membangun kerukunan agama tidaklah ringan. Meskipun sejumlah

pedoman telah digulirkan, pada umumnya masih sering terjadi gesekan-gesekan, terutama berkaitan dengan penyiaran agama, pembangunan rumah ibadat, dan sebagainya (Ali, Mursyid (*ed*), 2009: xiv). Pada tingkat tertentu ini dapat mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama.

Sehubungan dengan persoalan konflik tersebut dan untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul serta sekaligus melihat sejauhmana tingkat perekatan dalam hubungan antara umat beragama dewasa ini, Puslitbang Kehidupan Keagamaan memandang perlu dilakukan kajian, khususnya tentang Potret Kerukunan Umat Beragama.

Permasalahan

Kajian tentang potret kerukunan umat beragama ini dipandang penting berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain: 1) Pluralisme sosial di Indonesia merupakan aset bangsa yang dapat berkontribusi positif serta negatif bagi dinamika sosial dan perwujudan kerukunan serta keutuhan bangsa; 2) Fenomena konflik sosial bernuansa agama di berbagai daerah termasuk di Jawa Timur, masih acap kali muncul walaupun ekskalasinya relatif kecil, tidak sampai mengancam keutuhan bangsa. Masyarakat kita belum terbebas sepenuhnya dari konflik sosial bernuansa agama. 3) Munculnya berbagai kasus keagamaan di masyarakat perlu dicarikan solusinya.

Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai hal sebagai berikut: 1) Mengetahui pluralisme sosial di Indonesia sebagai aset bangsa yang dapat berkontribusi positif serta negatif bagi dinamika sosial dan perwujudan kerukunan serta keutuhan bangsa; 2) Mengetahui fenomena konflik sosial bernuansa agama di berbagai daerah

khususnya di Jawa Timur, yang kadang-kadang muncul walaupun eskalasinya relatif kecil, tidak sampai mengancam keutuhan bangsa. 3) Mengetahui kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya terbebas dari konflik sosial bernuansa agama. 4) Mengetahui munculnya berbagai kasus keagamaan di masyarakat perlu dicarikan solusinya.

Adapun Kegunaan dari Penelitian ini adalah: 1) Hasil temuan kajian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam menyusun kebijakan di bidang kerukunan umat beragama oleh pimpinan di lingkungan Kementerian Agama dan berbagai pihak yang berkepentingan. 2) Pentingnya informasi yang jelas dan lengkap serta obyektif tentang kerukunan umat beragama yang dapat dijadikan acuan oleh pihak-pihak terkait guna mengetahui dan melihat potret kerukunan secara lebih jelas.

Metode Penelitian

Lokus Penelitian

Menurut Ayu Sutarto¹ dari Universitas Jember, di wilayah Jawa Timur terdapat empat kawasan budaya besar dan berpengaruh (*culture area*), yakni: *Pertama*, kawasan budaya Mataraman, mencakup perbatasan Jawa Tengah di barat hingga Kabupaten Kediri, di timur. Kawasan ini banyak dipengaruhi budaya kerajaan Mataram dengan karakteristik umum, berakar budaya agraris, pola pemukiman desa mengelompok, solidaritas desa yang kuat dan gotong royong relatif kental.

Kedua, kawasan budaya Arek, meliputi wilayah dari pesisir utara Surabaya hingga daerah pedalaman selatan daerah Malang. Wilayah ini tergolong paling pesat perkembangan ekonominya. Banyak bersentuhan dengan

¹ Ayu Sutarto, Peta Politik Jawa Timur, Kompas, 11 Maret 2009.

budaya pendatang, semangat juang tinggi, solidaritas sosial kental dan terbuka terhadap perubahan.

Ketiga, kawasan budaya Madura Kepulauan, dengan sebagian besar geografisnya merupakan lahan kering, ekologi tegal, pola pemukiman desa terpencar, solidaritas desa longgar, hubungan sosial berpusat pada individu dengan keluarga inti sebagai dasar, dan patuh pada tokoh agama.

Keempat, kawasan Pandalungan, meliputi tempat-tempat bertemunya budaya Jawa dan budaya Madura. Ciri-cirinya antara lain; agraris, egaliter, kerja keras, agresif, ekspansif, solidaritas kelompok tinggi, tokoh ulama selaku pemimpin kunci. Wilayahnya meliputi: Pasuruan, Probolinggo, Situbundo, Bondowoso, Lumajang dan Jember.

Mengingat luasnya wilayah Jawa Timur dan berbagai keterbatasan yang dihadapi kajian ini, maka lokasi yang dijadikan sasaran penelitian ini meliputi 12 kabupaten/kota yang mewakili empat kawasan budaya di atas, masing-masing: 1) kawasan budaya Mataraman, yang meliputi: Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Kediri; 2) Kawasan budaya Arek yang diwakili kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Malang; 3) Kawasan budaya Madura Kepulauan, terdiri dari Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sumenep; dan 4) Kawasan budaya Pandalungan, diwakili Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso dan Kabupaten Jember.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk dewasa (berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah) Provinsi Jawa Timur, dan sampel diambil dari 12 kabupaten/kota. Pemilihan 12 kabupaten/kota dilakukan dengan cara purposive, berdasarkan kultur masyarakat

Jawa Timur yang memiliki empat kawasan budaya besar yang berpengaruh, yaitu: Mataraman, Arek, Madura Kepulauan, dan Pandalungan. Kawasan Mataraman diwakili oleh Kabupaten Madiun, Kediri dan Ngawi; Kawasan Arek diwakili oleh Kota Surabaya, Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo; Kawasan Madura Kepulauan diwakili oleh Kabupaten Bangkalan dan Sumenep; Kawasan Pandalungan diwakili oleh Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso dan Jember.

Responden diambil sebanyak 100 orang secara acak tiap kabupaten/kota yang berasal dari dua kecamatan yang memiliki dinamika kerukunan (misalnya pernah terjadi kasus konflik keagamaan). Dengan demikian jumlah sampel seluruhnya adalah 1.200 responden. Pengambilan sampel total tersebut juga tetap mempertimbangan tingkat proporsionalitas identitas responden terhadap populasi. Misalnya dalam hal proporsi pemeluk agama, mata pencaharian, tingkat pendidikan dan lain-lain.

Sebelum survei digulirkan, terlebih dahulu dilakukan kegiatan uji coba instrumen untuk menguji tingkat reliabilitas dan validitasnya. Kegiatan uji coba dilakukan dengan menggunakan 40 kuesioner di beberapa kabupaten Jawa Timur dengan hasil tingkat reliabilitas sebesar 0.807 dengan item valid terpilih sebanyak 25 butir yang berskala ordinal. Sedangkan butir item berskala nominal tetap digunakan untuk menjaring pendapat karena responden boleh menjawab lebih dari satu. Item-item inilah yang digunakan sebagai instrumen survei.

Analisis data kuantitatif dilakukan secara deskriptif berupa penghitungan nilai rata-rata, maksimum-minimum, tabulasi frekuensi dan dalam bentuk grafik. Variabel yang diukur adalah toleransi dan harmoni keagamaan (butir pertanyaan nomor 1-11), kerjasama (butir pertanyaan nomor 12-21), dan peran pemerintah dan umat beragama dalam

upaya mewujudkan kerukunan (butir pertanyaan nomor 22-31). Masing-masing butir item diukur dengan menggunakan skala likert lima mulai dari: 1) tingkat sangat tidak setuju; 2) tidak setuju; 3) kurang setuju; 4) setuju; dan 5) sangat setuju.

Data yang dihimpun

Beragam informasi yang dikumpulkan melalui penelusuran ini, meliputi: 1) kondisi umum kehidupan sosial, budaya dan keagamaan; 2) interaksi dan toleransi antar umat beragama; 3) potensi konflik dan kerukunan; 4) kasus keagamaan yang muncul, faktor penyebab, pelaku dan dampak konflik; 5) cara penyelesaian kasus; 6) upaya tindak lanjut untuk memelihara dan meningkatkan kerukunan umat beragama.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Berbagai informasi menyangkut kerukunan, digali melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan para narasumber yang dipandang memiliki informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan. Para narasumber terdiri dari sejumlah pejabat pemerintah setempat (Kemenag, Pemda, Kepolisian, Kejaksaan), tokoh-tokoh keagamaan, masyarakat dan tokoh adat.

Kuesioner

Untuk menjangkau dan melengkapi informasi tentang interaksi dan toleransi antarumat beragama setempat, disebarakan seperangkat daftar pertanyaan kepada sebanyak 1200 responden di 12 wilayah kabupaten/ kota. Responden terdiri dari anggota masyarakat umum yang berusia minimal 17 tahun, dari berbagai kelompok agama, etnis dan sosial budaya setempat.

Dokumentasi

Penelusuran dan telaah terhadap sejumlah literatur dan dokumentasi terkait kerukunan baik berupa dokumen resmi maupun dokumen pribadi, yang dapat memperkaya informasi sesuai dengan kebutuhan.

Observasi

Pengamatan singkat di lapangan dilakukan terhadap berbagai kenyataan sosial keagamaan, peristiwa, aktifitas, dan benda-benda yang bermakna dan terkait dengan tujuan penelitian.

Pengolahan Data

Berbagai informasi terkait kerukunan yang berhasil dihimpun, kemudian diseleksi, dikoreksi, diklasifikasi, dikomparasi, dilihat saling berhubungannya (masalah kausalitet), dianalisis, diinterpretasi, dan ditarik kesimpulan-kesimpulan pokok yang dianggap penting dan menyeluruh ditambah rekomendasi hasil penelitian ini.

Sistematika

Buku ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan, metode penelitian, serta sistematika.
- Bab II. Kerangka konseptual yang menjelaskan tiga hal yaitu kemajemukan, jarak sosial dan kerukunan
- Bab III. Temuan lapangan dan pembahasan, mengamati hasil temuan lapangan yang membahas tentang kehidupan agama dan budaya, kerukunan di wilayah lokasi penelitian, potensi kerukunan agama, serta memuat hasil survei
- Bab IV. Penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi

2

Kerangka Konseptual

Kemajemukan

Kemajemukan merujuk pada pengertian bermacam-macam. Menurut Fedyani (1986:ix), kemajemukan (pluralitas) berarti terdapatnya keanekaragaman unsur penyusun masyarakat, yaitu suku bangsa (etnik), agama, golongan-golongan sosial lainnya. Unsur-unsur struktur sosial tersebut, secara sosio-kultural maupun politis, memiliki identitas masing-masing yang cenderung untuk saling diketahui dan diterima dalam masyarakat.

Implikasinya, kemajemukan dalam skala tertentu dapat dipandang sebagai aset kekayaan masyarakat (bangsa) yang dapat berkontribusi positif bagi tumbuhnya persaingan secara sehat yang berakibat terjadinya kemajuan atau perubahan sosial yang dinamik. Arthur F. Bentley (1908) dalam bukunya David L Sill (1986:168), tentang *International Encyclopedia of The Social Sciences*, menggarisbawahi bahwa “dinamika perubahan sosial sangat ditentukan oleh interaksi antar kelompok yang berbeda”. Namun dalam keadaan berbeda, kemajemukan tidak hanya dipandang sebagai perbedaan belaka, tetapi juga sebagai pertentangan atau konflik. Tantangan yang dihadapi masyarakat adalah bukan menghilangkan

perbedaan dan pertentangan, melainkan bagaimana mengelola secara kreatif sehingga mewujudkan dalam *cooperation* dan *competition*.

Jarak sosial

Secara bahasa jarak sosial terdiri dari kata jarak dan sosial. Jarak didefinisikan sebagai ruang sela (panjang atau jauh) antara dua benda atau tempat: "...antara Mekah dan Medinah kami tempuh dengan bus dalam 5 jam"; 2). Sedangkan kata sosial didefinisikan sebagai berikut: 1). berkenaan dengan masyarakat: "perlu adanya komunikasi - - dalam usaha menunjang pembangunan ini"; 2). suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dsb): Dengan demikian jarak sosial diartikan sebagai tingkat keakraban yang menandai hubungan individu dalam interaksi sosial.

Kerukunan : Konsep dan Signifikansi Sosialnya

Perkataan "rukun", secara etimologi, berasal dari bahasa Arab yang berarti tiang, dasar, dan sila (Lubis, 1924:21). Kemudian, perkembangannya dalam bahasa Indonesia, kata rukun sebagai kata sifat berarti cocok, selaras, sehati, tidak berselisih (Poerwodarminto: 1954). Dalam bahasa Inggris disepadankan dengan "*harmonious*" atau "*concord*" (Echols, dan Shadily, 1994: 468). Dengan demikian, kerukunan berarti kondisi sosial yang ditandai oleh adanya keselarasan, kecocokan, atau ketidakberselisihan (*harmony, concordance*). Dalam literatur ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah integrasi (lawan disintegrasi) yang berarti : "*the creation and maintenance of diversified patterns of interactions among autonomous units*" (Wallace, 1990: 9).

Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam di

antara unit-unit (unsur/subsistem) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan (Lubis, 2004: 24-26). Konflik, sebaliknya, diartikan secara berlawanan dengan kerukunan. Berdasarkan konsep tersebut, dengan demikian, konflik kerap diartikan sebagai suasana hubungan yang ditandai oleh perseteruan, permusuhan, ketidakcocokan, dan perselisihan. *“Conflict is the overt struggle between individuals or groups in the society, or between state”* (Jary, dan Jary, 1999:113), atau antara kelompok kepentingan, partai politik, etnik, ras, kelompok agama, atau gerakan sosial lainnya.

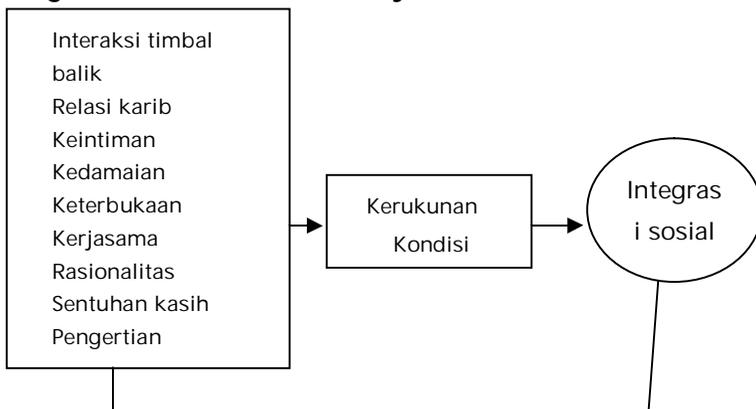
Sebagai kondisi maupun proses pengembangan pola-pola interaksi sosial, kerukunan memiliki fungsi penting bagi penguatan dan pemeliharaan struktur sosial suatu masyarakat. Kerukunan dapat menjadi katup pengaman (*safety valve*) bagi disintegrasi sosial. Kerukunan dapat mereduksi konflik, disamping secara fungsional-struktural berfungsi membangun keseimbangan masyarakat (*social equilibrium*). Dengan demikian, kerukunan berfungsi mengontrol, memelihara, menguatkan, dan membangun “ikatan sosial” struktur masyarakat. Kerukunan mengontrol unsur untuk saling mengikat dan memelihara keutuhan bersama agar tetap eksis. Secara terinci, makna dan fungsi kerukunan dapat difahami dalam berbagai konteks dimensi kehidupan masyarakat. Namun demikian, berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas bahwa perseteruan (konflik) apa pun basisnya merupakan faktor penyebab terbentuknya struktur suasana sebaliknya yaitu kondisi disharmoni, saling bermusuhan, saling tidak percaya, dan berakhir saling menghancurkan.

Pada dimensi komunikasional,² kondisi rukun (kerukunan) yang mempersyaratkan adanya interaksi resiprokal, hubungan karib, keintiman, kedamaian, dan ketenangan yang didasarkan pada sikap keterbukaan, kerjasama, sentuhan kasih, dan saling pengertian, pada gilirannya dapat membangun dan memperkuat integrasi sosial sekaligus mengurangi ketegangan dan konflik sosial. Kerukunan pada dimensi ini berfungsi sebagai "*conflict reduction*" dan juga *safety valve* terjadinya disintegrasi sosial. Konflik sebaiknya berfungsi sebagai "*harmony distruction*" atau "*distruction accelerator*". Pada dimensi sosio-kultural,³ kerukunan yang berwujud sebagai "integrasi budaya", "integrasi normatif", "integrasi konsensual", dan "integrasi fungsional" mempunyai banyak fungsi dalam penataan dan pencapaian tujuan hidup masyarakat. *Pertama*, pada dimensi ini, kerukunan menumbuhkan terjadinya pola interaksi untuk penguatan lembaga pengaturan (*body of normative elements*) yang dapat menata perilaku komunitas dalam sistem yang konsisten, seperti tergambar dalam bagan berikut:

² Dimensi komunikasional berkaitan dengan proses komunikasi yang melibatkan unsur komunikator, komunikan, pesan, media dan efek

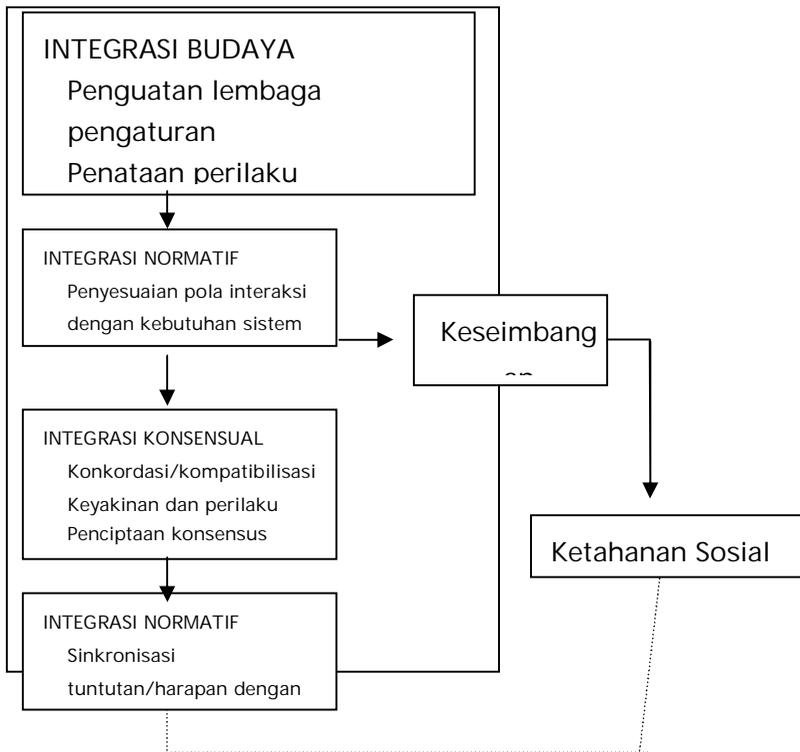
³ Dimensi sosio-kultural berkaitan dengan aspek penciptaan dan pemberlakuan norma dan nilai dalam sistem sosial

Bagan 1 : Proses Terbentuknya Kerukunan



Kedua, kerukunan menyebabkan terjadinya struktur situasi kondusif. Perilaku interaksi (antar berbagai pihak terkait) sesuai dengan kebutuhan sistem norma yang ada. *Ketiga*, kerukunan membangun suasana yang memudahkan terbangunnya konsensus dan kesepakatan yang efektif terhadap keyakinan, nilai atau tindakan. Melalui transmisi preskripsi, proskripsi dan saling berbagi perasaan, keyakinan dan tindakan, kerukunan dapat dibentuk dengan baik dan mereduksi kompetisi antar kelompok kepentingan dalam masyarakat. *Keempat*, kerukunan pada dimensi sosio-kultural berfungsi mengakomodasi proses sinkronisasi antara tuntunan timbal balik pada tingkat perilaku lahiriah. Kerukunan atau integrasi dalam berbagai aspeknya baik dalam perspektif mikro maupun makro merupakan hal yang "*imperatively functional*". Kerukunan membangun struktur situasi yang kondusif terjadinya proses interaksi resiprokal yang mengarah pada keseimbangan sosial, keamanan, stabilitas dan ketahanan sosial. Beberapa hal yang perlu dikembangkan, seperti bagan di bawah ini:

Bagan 2 : Integrasi Sosial



Yang perlu dikembangkan diantaranya:

Pertama, wadah kerukunan yang kuat. Wadah ini harus merupakan forum komunikasi kelompok-kelompok (interaktan) yang secara murni menghendaki kerukunan. Untuk itu, wadah harus memiliki kejelasan orientasi (visi dan misi) yang dapat diprogramkan.

Kedua, sistem norma, atau perangkat pengaturan ikhwal norma dan nilai tentang ekspektasi serta preskripsi dan proskripsi yang diperlukan. Sistem norma dan nilai yang dibangun niscaya harus merepresentasikan prinsip-prinsip kejelasan orientasi, relevansi dengan kebutuhan,

keadilan bagi semua pihak, kebersamaan, dan kepraktisan. Dalam konteks ini, peran pemerintah dan masyarakat sangat menentukan derajat keberhasilan terbangunnya proses integrasi sosial masyarakat. Pemerintah, dalam hal ini, paling tidak mampu menjembatani dan memediasi kepentingan semua pihak yang berkepentingan atau bertikai. Pemerintah harus merupakan instrumen yang responsif untuk menjaga keseimbangan kelompok kepentingan yang bertikai, serta kebijakan politik harus dapat difahami sebagai *the free play of group pressures*.



Temuan Lapangan & Pembahasan

Kehidupan Agama dan Budaya

Mayoritas penduduk Provinsi Jawa Timur adalah etnik Jawa dan beragama Islam. Dalam menjalani hidup kesehariannya, mereka menjadikan budaya Jawa yang dipadukan dengan ajaran Islam yang berbasis pondok pesantren sebagai kerangka acuan yang mengatur tatanan berperilaku dan merespon berbagai persoalan yang mereka hadapi. Selaku masyarakat yang secara kultural berbasis Jawa dan Islam, etika moral, prilaku sosial, politik, cenderung ditilik dari sudut pandang kaca mata etika moral agama dengan “tokoh kyai” diperlakukan sebagai panutan utama. Selain menyangkut agama, kyai juga berpengaruh luas dalam kehidupan sosial. Secara politis di Jawa Timur, kyai tidak jarang ikut mewarnai proses pengambilan keputusan yang penting menyangkut kehidupan sosial, mengenai pemerintahan, budaya, maupun hubungan antar kelompok masyarakat.

Masyarakat Jawa Timur pada umumnya, juga dikenal sebagai masyarakat terbuka, toleran, mudah rukun, akrab dalam pergaulan, santun, kekeluargaan, tenggang

rasa, dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Nilai agama dan budaya Jawa ini memengaruhi kelompok-kelompok sosial yang berasal dari berbagai daerah dan etnis pendatang yang senantiasa berupaya menyesuaikan diri agar bisa diterima oleh warga asli Jawa setempat, sehingga tidak banyak terjadi benturan dan konflik yang berskala besar dan berlangsung lama (Ali dan Fuad, 2005).

Mengenai pengelompokan keagamaan, sebagian anggota masyarakat Muslim tergabung dalam kelompok Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Mereka yang berada dalam kelompok NU banyak berkiprah di bidang pendidikan dan dakwah melalui pondok pesantren, madrasah, majelis taklim, pengajian, tahlilan, yasinan baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Sementara Muhammadiyah banyak bergerak di bidang pendidikan dan sosial melalui sekolah-sekolah mulai tingkat taman kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi, rumah sakit, klinik, panti asuhan, bisnis keuangan, perhotelan dan beragam usaha di bidang jasa.

Kalau NU, unggul dalam hal pembinaan ibadat spiritual, sedangkan Muhammadiyah menonjol dengan ibadah sosial.

Adapun Kelompok Kristen dan Katolik dalam skala yang lebih kecil sesuai dengan jumlah penganutnya, selain tekun membina jemaatnya lewat gereja-gereja juga efektif membina lembaga-lembaga pendidikan, rumah sakit, klinik, panti asuhan dan lembaga sosial keagamaan lainnya.

Sedangkan Kelompok Hindu dan Budha, terkesan lebih fokus pada pembinaan dalam, konsolidasi internal. Selain itu, kedua kelompok ini juga melakukan kegiatan sosial kemanusiaan secara terbuka seperti pengobatan murah bahkan gratis.

Di wilayah Jawa Timur tercatat jumlah penganut agama dan rumah ibadat yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk menurut Agama dan Rumah Ibadat di Jawa Timur tahun 2010

Agama	Penganut	%	Rumah Ibadat	%
Islam	34.884.126	95.06	36.39	91.54
Kristen	762.862	2.08	2.284	5.75
Katolik	479.257	1.31	490	1.23
Hindu	343.551	0.94	355	0.89
Budha	209.993	0.57	225	0.59
Lainnya	16.845	0.05	-	0

Sumber: BPS Jawa Timur

Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan hidup beragama merupakan suasana komunikasi yang harmonis dalam dinamika interaksi antarumat beragama, baik interaksi personal maupun antar kelompok keagamaan. Kerukunan tersebut tercermin dalam pergaulan hidup keseharian umat beragama yang berdampingan secara damai, toleran, saling menghargai kebebasan keyakinan dan beribadat sesuai dengan ajaran agama yang dianut, serta adanya kesediaan dan kemauan melakukan kerjasama sosial dalam membangun masyarakat dan bangsa. Kerukunan umat beragama ini bisa dilihat dari dua sisi yakni kerukunan antar kelompok yang berbeda agama di satu sisi, sementara di sisi lainnya adalah suasana kerukunan yang terdapat di lingkungan internal suatu kelompok agama tertentu.

Berkenaan dengan kerukunan antar kelompok keagamaan di Jawa Timur, khususnya di dua belas lokasi

sasaran, tidak nampak adanya benturan-benturan berskala besar. Hal ini sejalan dengan jawaban para responden terhadap kuesioner yang disebarakan dengan menghasilkan indeks potret kerukunan sebesar 3,58. Dengan skala penilaian 1-5 dan rentang skor antara 1 sampai 50, maka angka di atas dimasukkan dalam kategori rukun. Namun bukan berarti di Jawa Timur tidak pernah terjadi konflik atau tidak berpotensi munculnya konflik kelompok keagamaan, misalnya protes kelompok agama tertentu terhadap penggunaan rumah tinggal yang dipakai sebagai tempat ibadat, muncul di sebagian besar lokasi kajian ini. Demikian pula protes terhadap pendirian rumah ibadat yang dipandang tidak sesuai dengan PBM No. 9 dan 8 tahun 2006. Dakwah dan penyiaran agama yang menyinggung atau dianggap menodai agama lain.

Berkaitan dengan kerukunan internal kelompok agama, menurut beberapa orang informan dari kalangan pejabat Kementerian Agama setempat dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Jawa Timur terdapat konflik berskala kecil dan tidak sampai terjadi kekerasan. Konflik tersebut dipicu dan bermula dari perbedaan faham, aliran atau sekte-sekte internal kelompok keagamaan. Di kalangan Islam, antara lain terdapat perbedaan faham dan beberapa pengamalan ajaran agama antara kelompok arus utama (*mainstream*) dengan kelompok Ahmadiyah, Syiah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Selain itu, pada waktu pemilu yang lalu juga terjadi konflik intern Islam karena perbedaan aspirasi politik di lingkungan tokoh-tokoh agama, misalnya konflik intern Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara kelompok Gus Dur versus kelompok Muhaimin Iskandar. Pada waktu pemilukada Provinsi Jawa Timur tahun 2009 terjadi konflik antar kelompok massa sesama NU, yaitu antara kelompok yang mendukung calon gubernur Chofifah Indar

Parawangsa versus pendukung Saefullah Yusuf yang diakhiri melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi.

Di lingkungan Kristen, bibit-bibit konflik mengemuka akibat perkembangan sekte-sekte dengan masing-masing gerejanya. Tiap gereja di lingkungan Kristen mempunyai otonomi, tidak ada keterkaitan hirarkis organisatoris maupun ikatan aspirasi keagamaan dengan gereja lain. Proses penyelesaian konflik antar pengurus gereja bisa berlarur-larut dan bisa merusak kerukunan intern Kristen. Keberadaan organisasi Persatuan Gereja Kristen Indonesia (PGI) belum mampu menyatukan/mewadahi seluruh organisasi gereja Kristen. Lebih dari separuh gereja Kristen, berada di luar PGI. (Wawancara dengan salah seorang pendeta, 26 Nopember 2010).

Banyak sekte-sekte di lingkungan Kristen berdampak pada meningkatnya kebutuhan-kebutuhan akan gereja. Masing-masing sekte membutuhkan gereja sendiri-sendiri, tidak seperti masjid di lingkungan Islam yang bisa digunakan oleh semua Muslim. Besarnya kebutuhan akan gereja tersebut menimbulkan kesan di kalangan non-Kristen (khususnya Muslim) antara lain bahwa kelompok Kristen sebagai kelompok agama yang agresif dan cenderung eksklusif dalam urusan pendirian rumah ibadat. Kesan seperti ini tentu saja bisa menimbulkan kesalahfahaman yang rawan konflik. (Wawancara dengan salah seorang, pejabat di lingkungan Pembimas Kristen Kementerian Agama)

Lebih lanjut, menurut penuturan seorang pendeta Kristen, selain karena keberadaan gereja-gereja yang di luar PGI, konflik bahkan kerusuhan lebih mudah disulut oleh faktor kesenjangan sosial ekonomi, khususnya antara penduduk asli dengan kelompok etnis Tionghoa atau antara penduduk asli dengan kelompok pendatang dari luar daerah.

Di kalangan Katolik, pembinaan kerukunan internal terkesan relatif lebih solid. Apabila muncul perbedaan, biasanya dalam waktu singkat bisa diselesaikan. Hal ini antara lain karena di kalangan Katolik hanya mengenal satu sistem gereja dan tidak semua warganya boleh menafsirkan ajaran agama, kecuali tokoh-tokoh atau forum tertentu yang memiliki otoritas khusus di bidangnya. Semua gereja Katolik berada di bawah naungan KWI setempat sesuai dengan wilayah keberadaan masing-masing.

Sementara di kalangan Hindu di Jawa Timur jarang terdengar adanya konflik internal. Kasus kelompok Sai Baba yang dahulu pernah muncul sekarang sudah reda dan tidak terdengar lagi.

Adapun di kalangan internal Buddha, perbedaan antara Walubi dengan kelompok Sangha, nampak belum sepenuhnya berhasil diselesaikan secara tuntas. Perselisihan menurut seorang aktivis Walubi, bermula dari soal kepengurusan tingkat pusat yang kemudian berkembang ketingkat daerah. Perbedaan tersebut pernah muncul kepermukaan, misalnya dalam upacara puncak penyelenggaraan Hari Raya Waisyak secara nasional. Di satu pihak, Walubi memusatkan upacara Waisyak di Candi Borobudur dan Mendut, sedangkan kelompok Sangha di tempat lain, di Jakarta.

Potensi Kerukunan

Menurut hasil wawancara dengan para narasumber di berbagai wilayah, beragam faktor yang dipandang potensial menunjang terwujudnya kerukunan di Provinsi Jawa Timur antara lain:

Pertama, karena faktor budaya, pada umumnya masyarakat Jawa Timur bersikap terbuka (*extrofet*), mudah akrab, senang bercanda, memiliki tenggang rasa (*tepo seliro*), cenderung lebih suka menghindari konflik, santun dalam

pergaulan, dalam berkomunikasi dalam bahasa daerah menggunakan tatakrama bahasa sesuai dengan hirarkhi sosial maupun hubungan keluarga. Selain itu, nilai-nilai agama (Islam) yang kental melekat dalam perilaku keseharian pergaulan sosial. Tatanan pergaulan sosial seperti itu sangat berpengaruh dan diikuti oleh warga pendatang baik dalam komunikasi yang bersifat personal maupun komunal. Nilai-nilai agama dan besarnya pengaruh tokoh-tokoh keagamaan, dapat difungsikan sebagai faktor pemersatu, khususnya dalam rangka penyelesaian konflik, baik di lingkungan keluarga, tetangga, pertemanan, maupun konflik antar kelompok sosial, intern dan antarumat beragama.

Kedua, adanya interaksi sosial dan dialog antar tokoh lintas agama serta lintas budaya melalui berbagai media dan forum komunikasi sehingga terjadi proses pendekatan untuk lebih saling memahami dan menerima perbedaan antar kelompok keagamaan, sekaligus meningkatkan kesadaran akan perlunya kebersamaan dan kerjasama sosial untuk kepentingan bersama.

Ketiga, adanya sejumlah tokoh yang mempunyai peran ganda dan aktif berada di lingkungan sejumlah satuan sosial yang berbeda (*cross cutting affiliation and loyalties*). Kesadaran tokoh-tokoh seperti ini sangat membantu dalam upaya menetralsir suasana bila sewaktu-waktu terjadi konflik.

Keempat, ikatan kebangsaan dan kesadaran saling ketergantungan setiap warga dan kelompok sosial termasuk kelompok keagamaan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup di manapun berada.

Kelima, upaya perwujudan kerukunan beragama dan keutuhan perwujudan berbangsa di Jawa timur, juga ditopang oleh adanya dukungan politis yang besar dengan otonominya dari pemda dan Kementerian Agama dengan

segenap perangkatnya di setiap wilayah pemerintahan, sesuai dengan fungsi pemda selaku penanggung jawab di bidang kerukunan dan keutuhan bangsa.

Potensi Konflik

Berkenaan dengan berbagai permasalahan sosial yang mengandung potensi konflik dalam masyarakat setempat dan dapat mengganggu serta merugikan berbagai upaya perwujudan kerukunan umat beragama meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pertama, tempat tinggal yang difungsikan sebagai rumah ibadat - dari laporan pemantauan lapangan - terdapat di sebagian besar kabupaten/kota yang dijadikan sasaran kajian ini. Hal ini menuai banyak protes, karena dipandang bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati bersama, yakni PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Protes masyarakat juga muncul di beberapa wilayah terkait sehubungan dengan pendirian atau kehadiran rumah ibadat yang dipandang tidak sesuai dengan prosedur atau persyaratan yang telah ditentukan dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Protes-protes seperti di atas dapat menimbulkan gejolak yang mengganggu kerukunan.

Kedua, persaingan politik dalam memperebutkan kekuasaan dan sumber daya ekonomi yang dilakukan dengan cara-cara yang kurang sehat, menyimpang dari aturan main dan koridor hukum yang sudah digariskan. Penggalangan kelompok massa termasuk kelompok agama di jalan raya dan tempat-tempat umum dalam upaya menghimpun dukungan, untuk memenangkan pemilu atau pemilukada. Penggalangan kelompok massa tersebut tidak jarang diiringi dengan perilaku kekerasan dan tindakan anarkis yang dapat menimbulkan kerusuhan.

Ketiga, penyalahgunaan simbol-simbol agama dalam upaya penggalangan dukungan oleh tokoh atau kelompok

agama untuk kepentingan politik praktis dalam pemilu atau pemilukada. Hal ini sering menuai protes dan mengakibatkan konflik antar massa kelompok agama yang mendukung tokoh atau figur yang berbeda, seperti Pemilukada Provinsi Jawa Timur tahun 2009, yaitu persaingan antara Chofifah Indar Parawangsa versus Saefullah Yusuf yang sama-sama berasal dari NU.

Keempat, kemunculan beberapa kelompok agama yang mengusung faham dan pengamalan ajaran agama yang tidak sesuai dengan faham agama kelompok arus utama (*mainstream*), misalnya Ahmadiyah yang dipandang oleh sebagian besar kelompok arus utama dapat merusak ajaran Islam yang murni dan meresahkan kelompok Muslim. Aksi-aksi demo yang menentang kehadiran kelompok agama yang dianggap "menyimpang" ini, pada gilirannya dapat menyulut konflik dan mengganggu kerukunan internal umat Islam.

Kelima, dari laporan hasil wawancara dengan para tokoh agama dan pejabat pemerintah (Pemda dan Kemenag) dapat diambil kesimpulan sementara, bahwa faktor kesejahteraan sosial ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap upaya perwujudan kerukunan. Jarak sosial atau ketimpangan ekonomi antara kota dan desa, antara majikan dengan buruhnya, antara kelompok pengusaha dengan kelompok pedagang kecil, dapat mengakibatkan keresahan dan konflik antar kelompok masyarakat, termasuk antar kelompok pribumi dengan warga keturunan Tionghoa sebagaimana yang pernah muncul di Sumenep dan Pasuruan.

Keenam, dampak modernisasi dan perkembangan budaya global seperti pergaulan bebas, narkoba serta budaya kekerasan yang makin luas dan sangat mencemaskan, merupakan rongrongan terhadap keutuhan keluarga yang menjadi basis masyarakat, merusak kearifan lokal dan

ajaran agama yang menjadi acuan masyarakat setempat. Gejala sosial akibat budaya global ini ditentang oleh berbagai kelompok, terutama kelompok agama, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Jawa Timur. Gangguan dan kerusakan terhadap tatanan moral serta keutuhan keluarga menambah runyam dan kompleksitas persoalan, meningkatkan labilitas sosial yang mengundang munculnya suasana rawan konflik.

Konflik Bernuansa Agama

Selama kurun waktu sekitar tahun 2000-2010 sekarang ini, sejumlah kasus konflik bernuansa agama muncul di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Timur baik yang bersifat internal maupun antar kelompok keagamaan, meliputi peristiwa-peristiwa berikut.

Pertama, intern umat Islam, keberadaan kelompok seperti Ahmadiyah, Syi'ah dan di kalangan kelompok lebih terbatas keberadaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), telah menuai banyak protes dan aksi-aksi demo di berbagai tempat, karena kelompok-kelompok tersebut dianggap menyimpang dari faham agama yang dianut kelompok Muslim arus utama. Demo menentang keberadaan aliran/faham tersebut di atas pernah muncul di Kabupaten Bangkalan, Pasuruan, Bondowoso, Kediri, Jember, dan Kota Malang.

Belakangan demo-demo semacam itu sudah mereda, setelah sering diadakan musyawarah dan dialog baik di antara ormas-ormas Islam, maupun antar ormas Islam dan pemerintah setempat.

Kedua, dari hasil pemantauan di lapangan, kasus rumah ibadat merupakan kasus agama yang paling sering dan banyak terjadi di Jawa Timur. Kasus ini umumnya berbentuk protes masyarakat sekitar terhadap rumah tinggal yang digunakan sebagai rumah ibadat serta aksi

protes atau pernyataan penolakan keberadaan gereja. Kedua hal tersebut dipandang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama Majelis-majelis Agama yang dituangkan dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Protes dan penolakan seperti di atas, paling tidak muncul di tujuh kabupaten /kota di Jawa Timur masing-masing di Kota Surabaya, Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo, (kawasan budaya Arek); Bondowoso, Pasuruan dan Jember (kawasan budaya Pandalungan); dan Kabupaten Sumenep (kawasan budaya Madura Kepulauan).

Selain itu, di Sumenep terjadi penolakan masyarakat setempat terhadap pembangunan Masjid Yayasan al-Uswah di Desa Bangkalan (2009), karena dicurigai para pengurusnya berasal dari kelompok garis keras yang dicemaskan mempunyai jaringan dengan kelompok teroris.

Pada umumnya kasus-kasus rumah ibadat seperti di atas, sudah ditangani dan dianggap selesai melalui musyawarah secara kekeluargaan dan dialog-dialog intensif antar tokoh-tokoh agama bersama-sama dengan pejabat pemerintahan setempat.

Ketiga, pada tahun 2007, di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, terjadi peristiwa beberapa warga (non Muslim) memasuki masjid "Al-Salam" dengan memakai simbol-simbol yang lazim digunakan warga Muslim. Menurut penuturan seorang informan dan dibenarkan oleh seorang Pendeta Yohanes Hadi Prajitno Kristen, kasus ini dipandang sebagai penistaan agama dan diselesaikan melalui proses hukum.

Keempat, di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, menurut salah seorang informan dari Kantor Kemenag, masyarakat setempat merasa resah karena adanya aktivitas penyiaran agama terselubung yang ditujukan kepada kelompok yang sudah beragama (Muslim abangan). Bila hal tersebut dibiarkan berlangsung berlarut-larut, dikhawatir-

kan akan mengundang konflik yang merusak kerukunan umat beragama setempat.

Di Kabupaten Pasuruan terjadi ketegangan antar gereja akibat dari adanya aktivitas penyiaran agama dari suatu gereja yang ditujukan kepada jemaat atau anggota gereja lainnya supaya pindah gereja dengan imbalan tertentu. (Wawancara dengan seorang Pendeta).

Kelima, pada tahun 2009 yang lalu, khususnya di Surabaya dan umumnya di Jawa Timur bahkan sempat menjadi isu nasional, dihebohkan oleh persaingan politik antara dua tokoh yang berasal dari kelompok yang sama (NU) antara Chofifah Indar Parawangsa versus Saefullah Yusuf memperebutkan kursi jabatan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur. Seperti sudah diketahui publik, persaingan politik yang sengit dan menghebohkan tersebut, akhirnya diselesaikan melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi.

Keenam, menurut laporan di Kabupaten Sumenep, warga pribumi sempat menunjukkan kemarahan dan hampir saja terjadi pembakaran toko karena pemiliknya (etnis Tionghoa) melarang buruhnya melaksanakan shalat Jum'at. Peristiwa ini memancing kemarahan kelompok Muslim setempat karena dipandang sebagai perilaku sewenang-wenang kelompok minoritas yang mapan, terhadap kelompok ekonomi lemah. Akibat kurang meratanya pembangunan, maka terjadilah kesenjangan sosial ekonomi dimana-mana yang pada gilirannya dapat menyulut kerusuhan. Kasus serupa juga pernah muncul di Kabupaten Pasuruan dan Malang.

Penyelesaian Kasus

Berkenaan dengan langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan terhadap sejumlah kasus seperti dipaparkan di atas, secara keseluruhan ada empat macam pendekatan

yang ditempuh, masing-masing: 1) Pendekatan melalui musyawarah secara kekeluargaan; 2) Dialog-dialog intensif yang melibatkan para tokoh keagamaan bersama-sama pejabat terkait yang difasilitasi pemerintah setempat; 3) Proses hukum melalui pengadilan; 4) Diserahkan pada kebijakan pemda setempat.

Untuk mempermudah dan memperjelas persoalan terkait kajian ini, bisa disimak melalui matrik di bawah ini.

Potensi Kerukunan dan Konflik di Jawa Timur

No.	Potensi Kerukunan	No.	Potensi Konflik
1.	Kearifan lokal	1.	Pembangunan dan penggunaan tempat ibadat tidak sesuai dengan PBM tahun 2006.
2.	Ajaran agama dan pranata keagamaan yang kaya dengan nilai dan pesan kerukunan	2.	Persaingan politik yang kurang sehat.
3.	Peran ganda para tokoh agama di berbagai satuan sosial	3.	Penyalahgunaan simbol agama untuk kepentingan politik kelompok.
4.	Dukungan politis pemerintah (kemenag dan pemda) dalam upaya mewujudkan kerukunan, toleransi antar kelompok, suku, dan agama dalam pergaulan hidup keseharian.	4.	Perbedaan paham dan pengamalan ajaran agama yang tidak sesuai dengan paham agama arus utama.

5.	Saling ketergantungan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup keseharian	5.	Kesenjangan politik, ekonomi dan sosial
6.	Dialog multikultural lintas, agama, etnis, budaya, melalui berbagai media.	6.	Berkembangnya budaya global yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan kearifan lokal.

Bentuk Kasus, Penyebab dan Cara Penyelesaian di Jawa Timur

No.	Kasus	Penyebab	Penyelesaian yang dilakukan
1.	Protes dan penolakan terhadap rumah ibadah; Lokus : Surabaya, Malang, Sidoarjo, Bondowoso, Pasuruan, Jember, dan Sumenep.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan paham dan pengamalan ajaran agama yang tidak sesuai dengan faham keagamaan arus utama 2. Fanatisme kelompok dan kurangnya wawasan keagamaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Musyawarah secara kekeluargaan 2. Dialog antar tokoh agama terkait bersama dengan pejabat pemerintahan setempat

2.	Paham agama yang tidak sesuai dengan paham agama kelompok arus utama; Lokus: Pasuruan, Kediri, Bondowoso, Malang dan Bangkalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak sesuai ketentuan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 2. Persaingan antar pemimpin keagamaan 3. Fanatisme kelompok yang kurang proporsional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dialog antar tokoh keagamaan bersama pemerintah setempat 2. Musyawarah dialog melalui FKUB bersama Pemda 3. Diserahkan kepada pemda setempat
3.	Penistaan agama. Lokus: Sumenep dan Kota Malang	Penodaan dan penghinaan terhadap ajaran agama suatu kelompok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dialog antar para tokoh agama, masyarakat dan pejabat pemerintah 2. Proses pengadilan

4.	Penyiaran agama. Lokus: Kediri dan Pasuruan	Persaingan antar kelompok keagamaan dalam merekrut pemeluk	Musyawarah secara kekeluargaan .
5.	Penyalahgunaan simbol agama untuk kepentingan politik kelompok' Lokus: Jawa Timur	1. Persaingan politik kurang sehat; 2. Penyalahgunaan simbol agama untuk kepentingan politik kelompok.	1. Dialog antar pihak-pihak terkait. 2. Proses hukum 3. Pemilu ulang
6.	Kesenjangan sosial ekonomi. Lokus: Sumenep, Pasuruan dan Malang	Sikap arogan dan sewenang-wenang terhadap bawahan	Pendekatan secara kekeluargaan melibatkan pihak terkait bersama-sama dengan tokoh agama dan pemerintah.

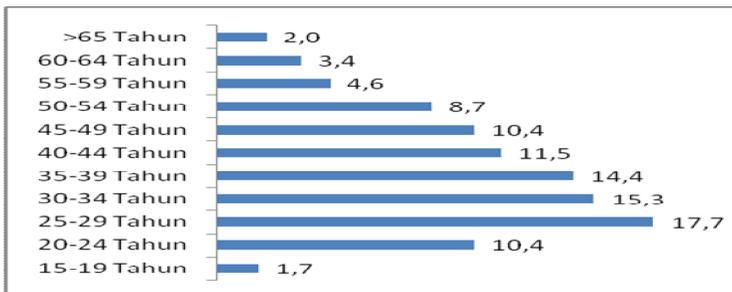
Hasil Survei

Identitas Responden

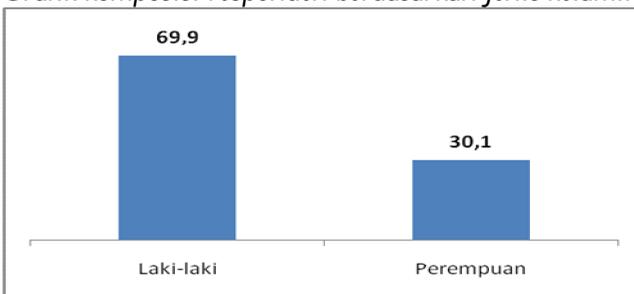
Dari sisi usia, 85 % responden berusia di bawah 50 tahun dan jumlah terbanyak pada kisaran usia 25-29 tahun. Juga sebanyak 49 % responden berada dalam kisaran usia 25- 40 tahun. Dengan kata lain, responden sebagian besar berada pada usia produktif. Kemudian komposisi responden dari sisi jenis kelamin, antara laki-laki dan perempuan memiliki perbandingan 70% berbanding 30%.

Pekerjaan responden sebagian besar adalah swasta / pegawai swasta sebesar 42.4%. Hal ini juga selaras komposisi penduduk Jawa Timur dimana pegawai swasta memiliki prosentase sebesar 47%. Kemudian dalam hal penghasilan, responden yang berpenghasilan di bawah satu juta rupiah mencapai 57%, selebihnya berpenghasilan di atas satu juta. Dalam hal tingkat pendidikan, respon didominasi dari lulusan SLTA sebanyak 53%, kemudian tingkat S1 sebesar 26.3 % dan berikutnya SLTP sebesar 8.5 %. Terakhir dalam hal komposisi pemeluk agama, responden yang beragama Islam sebanyak 85.6 %, disusul Kristen (6.9 %), Katolik (1.8 %), Hindu dan Budha masing-masing 1.7 % dan Konghuchu 0.3%. perhatikan beberapa grafik berikut:

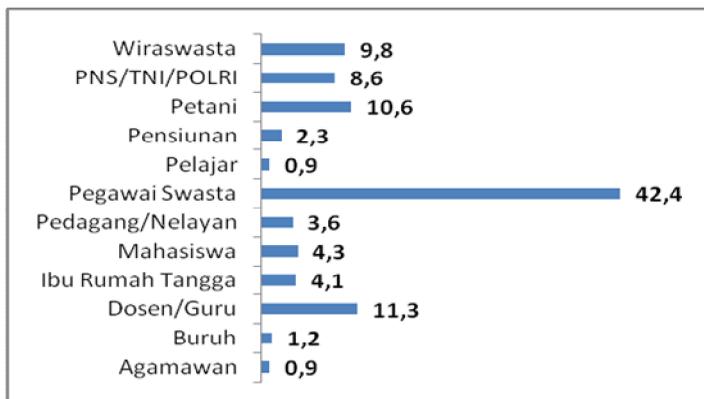
Grafik komposisi responden berdasarkan rentang usia



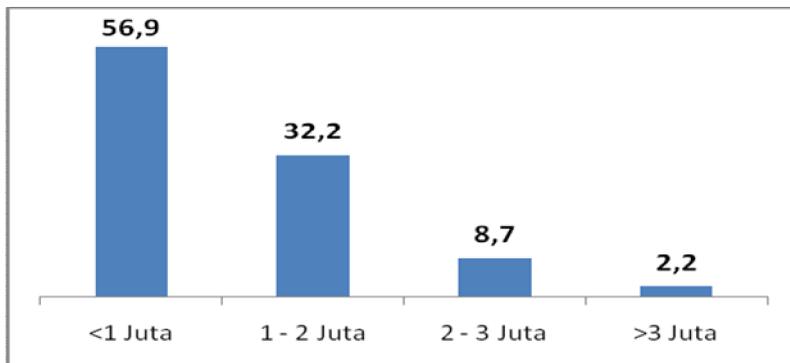
Grafik komposisi responden berdasarkan jenis kelamin



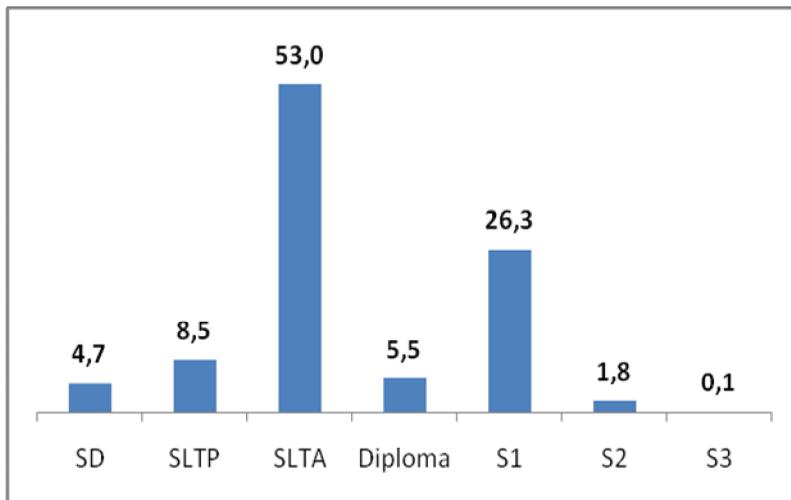
Grafik komposisi responden berdasarkan jenis pekerjaan



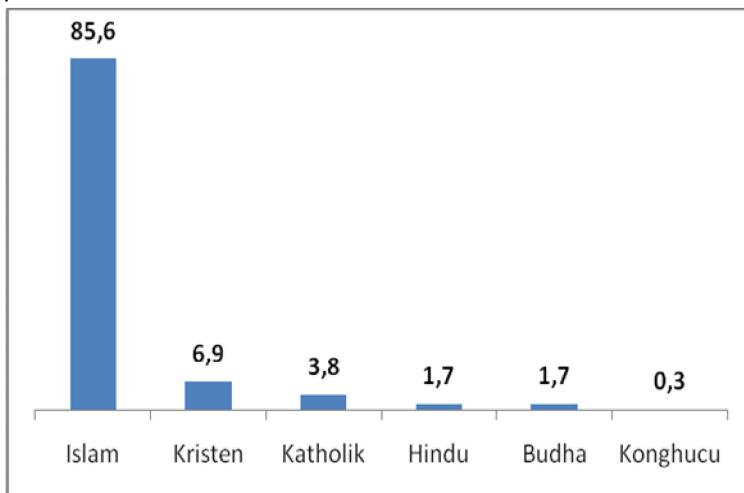
Grafik komposisi responden berdasarkan penghasilan



Grafik komposisi responden berdasarkan tingkat pendidikan



Grafik komposisi responden berdasarkan pemel



Indeks Kerukunan

Indeks kerukunan antar umat beragama diamati menggunakan tiga variabel yaitu : *toleransi dan harmoni keagamaan, kerjasama, dan peran pemerintah dan umat beragama dalam upaya mewujudkan kerukunan*. Indeks diukur dalam skala 5 karena mengacu pada pengukuran skala pada instrumen yang menggunakan skala Likert 5 dengan skor sebagai berikut:

- 1 : Sangat tidak setuju
- 2 : Tidak setuju
- 3 : Kurang setuju
- 4 : Setuju
- 5 : Sangat Setuju

Lebih jauh tentang kerukunan umat beragama di Jawa Timur, secara umum dapat disimak pandangan para responden melalui tabel berikut:

Tabel Kerukunan Perkabupaten, Perkawasan dan Total

No	Kab/Kota	Indeks Toleransi dan Harmoni	Indeks Kerjasama	Indeks Peran Pemerintah dan Umat Beragama dalam Upaya Perwujudan Kerukunan	Rata-rata
1	Madiun	3.61	3.45	4.18	
2	Kediri	3.29	3.46	4.02	
3	Ngawi	3.29	3.42	3.98	
	Mataraman	3.39	3.45	4.06	3.63
4	Surabaya	3.31	3.41	4.01	
5	Malang	3.39	3.38	3.97	

6	Sidoarjo	3.40	3.42	4.19	
Pesisir Arek		3.37	3.40	4.05	3.58
7	Bangkalan	3.16	3.40	3.79	
8	Sumenep	3.31	3.37	3.92	
Madura Kepulauan		3.23	3.39	3.86	3.49
9	Pasuruan	3.27	3.48	4.19	
10	Pb.linggo	3.31	3.40	3.79	
11	Bondowoso	3.36	3.27	4.03	
12	Jember	3.42	3.41	4.10	
Pandalungan		3.34	3.37	4.06	3.59
Total		3.34	3.40	4.02	3.58

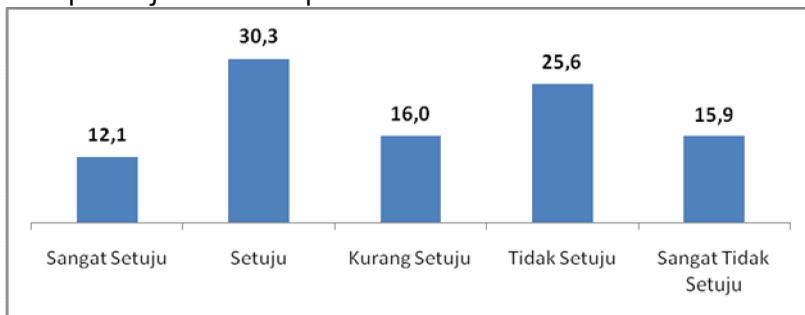
Dari tabel di atas tergambar bahwa secara keseluruhan dilihat dari gabungan unsur-unsur toleransi, kerjasama, peran pemerintah dan umat beragama, indeks kerukunan yang meliputi empat kawasan budaya di Jaawa Timur secara rata-rata mendapat skor sebesar 3.58. Dengan menggunakan rentang penilaian skor " sangat tidak rukun' (21-30), rukun (31-40) dan sangat rukun (41-50), maka angka indeks 3.58, bisa dikategorikan rukun.

Sementara disimak dari sisi kawasan, ternyata menurut penilaian para responden, kawasan budaya Mataraman dianggap paling tinggi tingkat kerukunannya (3.63). Sedangkan tingkat kerukunan yang paling rendah dibandingkan dengan tiga kawasan budaya lainnya adalah kawasan budaya Madura Kepulauan (3.49), walaupun bedanya tidak terlalu signifikan. Sedangkan indeks kerukunan kawasan Arek sebesar 3.58, hampir sama dengan indeks kerukunan kawasan Pandalungan sebesar 3.59.

Dengan demikian, empat kawasan budaya yang dijadikan sasaran kajian ini secara umum dapat dikategorikan rukun, walaupun belum sampai ketinggian sangat rukun.

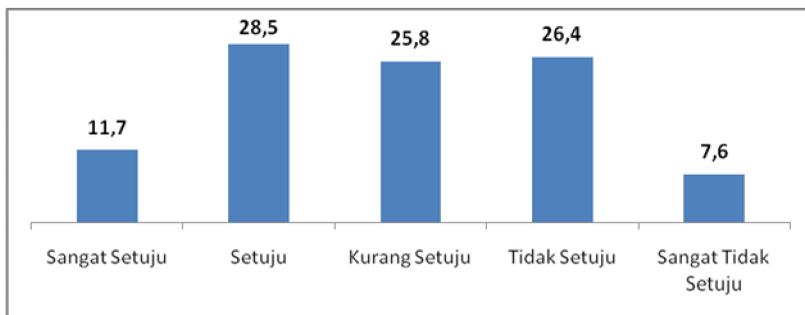
Pertanyaan no 1 : Saya menerima perbedaan agama di lingkungan keluarga saya

Komposisi jawaban responden :

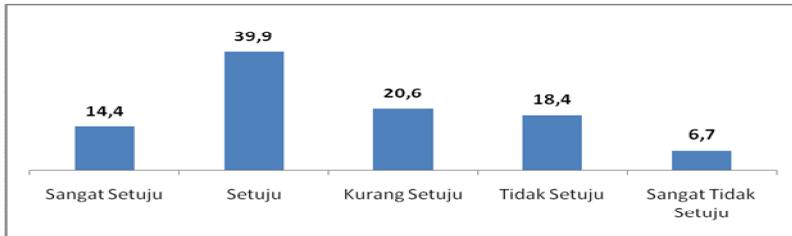


Pertanyaan no 3 : Saya keberatan bila warga berbeda agama dimakamkan di satu tempat pemakaman (TPU).

Komposisi jawaban responden :



Pertanyaan no 9 : Saya tidak keberatan berkunjung atau memberi ucapan selamat pada teman berbeda agama dalam perayaan hari besar agama. Komposisi jawaban responden:

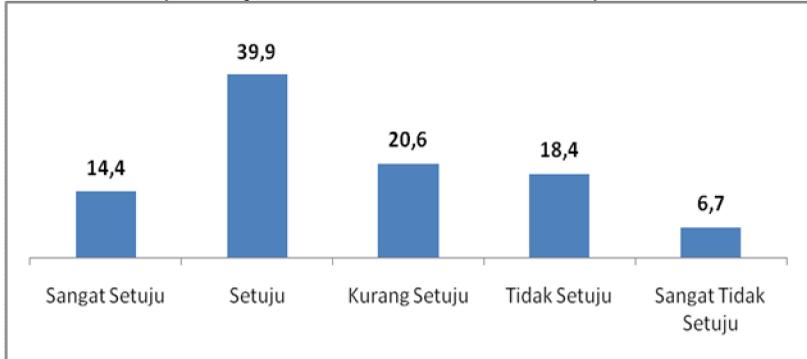


Maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah sikap seseorang yang menurutnya sesuai dengan ajaran agama dianutnya dapat menjadi sikap yang tidak toleran? Contoh-contoh pertanyaan di atas dalam beberapa survei yang lain juga sering dijadikan butir pertanyaan untuk mengukur tingkat toleransi. Jika indeks dibuat dalam skala 100, maka rata-rata indeks toleransi berada pada angka 66.8. Menurut hasil survei serupa yang dilakukan pada lokasi yang berbeda, indeks toleransi memang berada pada angka yang tidak jauh berbeda. Misalnya hasil penelitian yang dilakukan Pusat Kehidupan Keagamaan tahun lalu (2009) di Jawa Barat, angka indeks kualitas relasi dan komunikasi (butir-butir pertanyaannya hampir sama dengan toleransi) adalah 2.9 dalam skala 4, atau dalam skala 100 berarti **72.5**. Juga survei indikator toleransi yang dilakukan Sekretariat Badan Litbang dan Diklat tahun 2009 pada 15 propinsi juga menghasilkan indeks **68**.

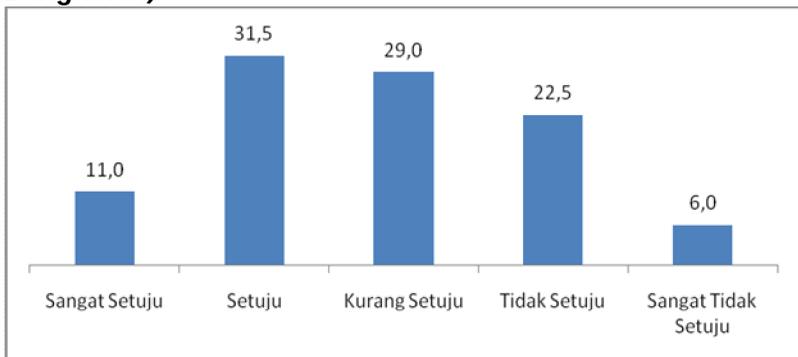
Berikutnya, jika diperhatikan dalam lingkup kawasan, maka kawasan Mataraman, Pesisir dan Pandalungan memiliki indeks toleransi yang tidak berbeda jauh. Akan tetapi untuk kawasan Madura kepulauan memiliki indeks yang lebih rendah dibandingkan indeks kawasan-kawasan di atas. Boleh jadi di antara penyebabnya adalah masalah yang telah diuraikan di atas, berikut ini adalah grafik perbandingan antara komposisi jawaban responden secara keseluruhan dengan responden khusus kawasan Madura:

Pertanyaan no 9 : Saya tidak keberatan berkunjung atau memberi ucapan selamat pada teman berbeda agama dalam perayaan hari besar agama.

Komposisi jawaban untuk seluruh responden:



Komposisi jawaban untuk seluruh responden khusus kawasan Madura Kepulauan (Sumenep dan Bangkalan):



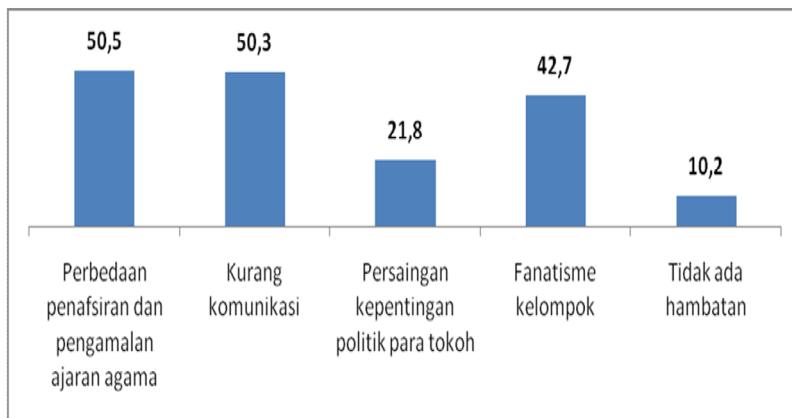
Dari penyajian dua grafik di atas, maka responden pada kawasan Madura Kepulauan memberikan respon yang agak kurang setuju dibandingkan dengan responden secara keseluruhan dalam masalah berkunjung dan memberi ucapan selamat terhadap agama lain.

Selain itu, indeks untuk *kerjasama* serta *peran pemerintah dan umat beragama dalam upaya perwujudan kerukunan* berada dalam posisi yang hampir sama untuk semua kabupaten/kota maupun kawasan. Indeks kerjasama sebesar **3.40**, sedangkan *peran pemerintah dan umat beragama dalam upaya perwujudan kerukunan* memiliki indeks yang cukup bagus yaitu **4.02**

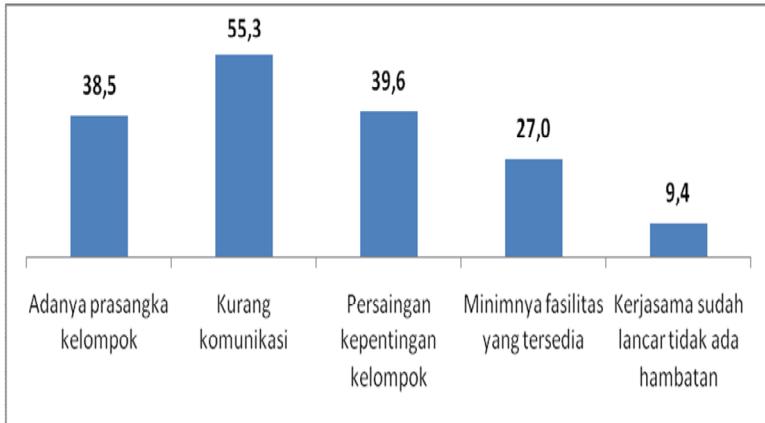
2. Hambatan Kerjasama

Hasil survei bagian butir pertanyaan nominal pada variabel kerjasama memberikan beberapa informasi sebagai berikut :

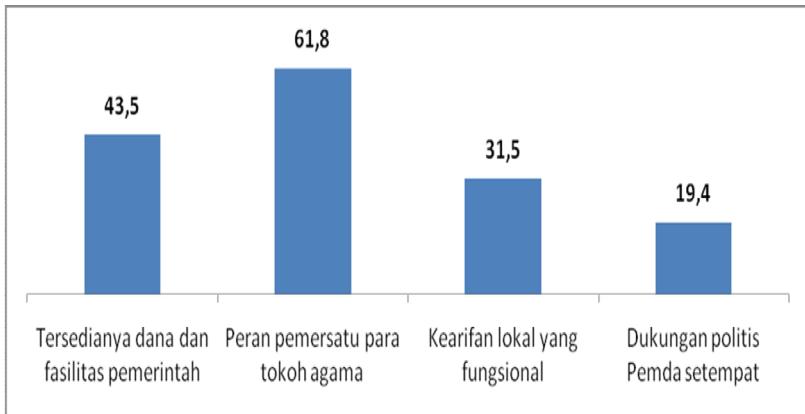
a. Hambatan kerjasama sosial keagamaan internal kelompok keagamaan setempat



b. Kerjasama sosial keagamaan antar ormas/kelompok agama setempat belum optimal lantaran



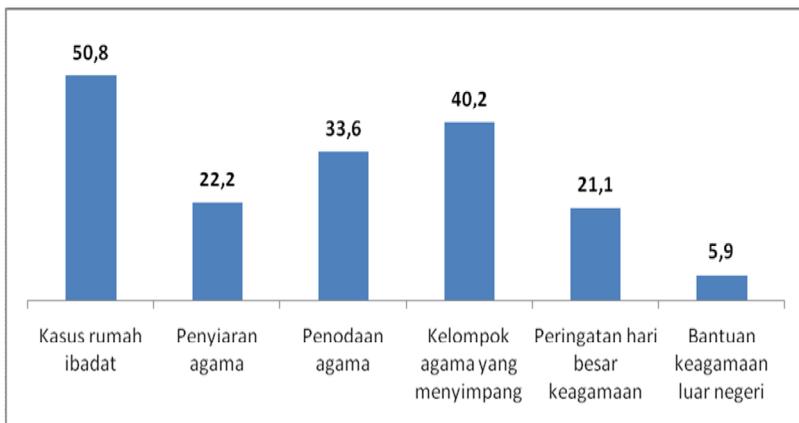
c. Kerjasama sosial keagamaan antara pimpinan ormas/tokoh keagamaan setempat dengan pejabat pemerintahan terkait



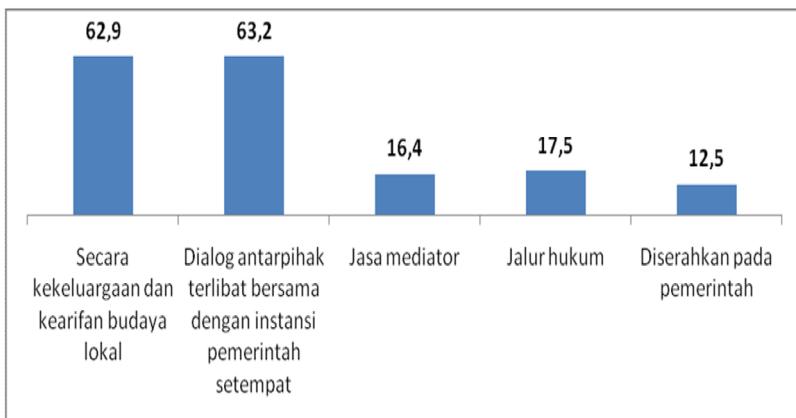
3. Kasus Keagamaan dan Cara Penyelesaiannya

Hasil survei sebagian butir pertanyaan nominal pada *kasus keagamaan* memberikan beberapa informasi sebagai berikut :

a. Kasus keagamaan yang pernah muncul di wilayah setempat



b. Cara yang ditempuh dalam penyelesaian kasus keagamaan setempat



4. Hubungan Indeks Kerukunan dengan Identitas Responden

- a. Semakin bertambahnya usia, semakin tinggi indeks toleransi dan kerjasama, namun di atas usia 65 tahun indeks-indeks tersebut turun kembali. Sedangkan untuk persepsi responden terhadap *peran pemerintah dan umat beragama dalam upaya perwujudan kerukunan* tidak tampak perbedaan yang nyata antar rentang usia

No	Usia	Indeks Toleransi dan Harmoni Keagamaan	Indeks Kerjasama	Indeks Peran Pemerintah dan Umat Beragama dalam Upaya Perwujudan Kerukunan
1	15-19	3.48	3.40	4.08
2	20-24	3.34	3.37	3.86
3	25-29	3.29	3.38	4.00
4	30-34	3.36	3.43	4.05
5	35-39	3.23	3.37	3.97
6	40-44	3.36	3.41	4.05
7	45-49	3.37	3.38	4.05
8	50-54	3.32	3.43	4.12
9	55-59	3.54	3.48	4.04
10	60-64	3.53	3.47	4.17
11	≥ 65	3.44	3.34	4.11

- b. Indeks kerukunan (mencakup 3 variabel) antara laki-laki dan perempuan hampir sama.

No	Jenis Kelamin	Indeks Toleransi dan Harmoni Keagamaan	Indeks Kerjasama	Indeks Peran Pemerintah dan Umat Beragama dalam Upaya Perwujudan Kerukunan
1	Laki-laki	3.35	3.41	4.02
2	Perempuan	3.33	3.36	4.04

Agamawan memiliki indeks tertinggi dalam hal *toleransi-harmoni*, mahasiswa dosen/guru serta wiraswasta memiliki indeks tertinggi dalam *kerjasama*, sementara PNS/TNI/POLRI memiliki indeks tertinggi dalam *peran pemerintah dan umat beragama dalam upaya perwujudan kerukunan*

No	Pekerjaan	Indeks Tolera nsi dan Harmo ni	Indeks Kerjasa ma	Indeks Peran Pemerintah dan Umat Beragama dalam Upaya Perwujudan Kerukunan
1	Agamawan	4.05	3.39	3.80
2	Buruh	3.35	3.35	3.93
3	Dosen/Guru	3.25	3.42	4.02
4	Ibu Rumah Tangga	3.52	3.31	3.97
5	Mahasiswa	3.42	3.48	4.01

6	Pedagang/Nelayan	3.31	3.40	4.00
7	Pegawai Swasta	3.34	3.39	4.03
8	Pelajar	3.21	3.32	4.11
9	Pensiunan	3.61	3.34	4.19
10	Petani	3.16	3.36	3.80
11	PNS/TNI/POLRI	3.36	3.42	4.21
12	Wiraswasta	3.36	3.45	4.07

- c. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi indeks kerukunannya

No	Pendidikan	Indeks Toleransi & Hrmni Keagmn	Indeks Krjsama	Indeks Peran Pemerintah dan Umat Beragama dalam Upaya Perwujudn Kerukunan
1	SD	3.18	3.31	3.89
2	SLTP	3.26	3.38	3.90
3	SLTA	3.35	3.39	4.03
4	Diploma	3.38	3.39	3.94
5	S1	3.35	3.43	4.08
6	S2	3.56	3.45	4.08
7	S3	4.09	3.43	4.86

- d. Semakin tinggi penghasilan per bulan, semakin tinggi pula indeks kerukunannya

No	Pendapatan	Indeks Toleransi dan Harmoni Keagamaan	Indeks Kerjasama	Indeks Peran Pemerintah dan Umat Beragama dalam Upaya Perwujudan Kerukunan
1	<1 Juta	3.28	3.37	3.96
2	1 - 2 Juta	3.36	3.41	4.09
3	2 - 3 Juta	3.54	3.43	4.17
4	>3 Juta	3.60	3.42	4.02

Beberapa fakta di atas memperkuat perolehan indeks toleransi di 12 lokasi penelitian sebesar **3.34** jika dikaitkan dengan profil responden. Misalnya indeks toleransi di atas 3.5 bila dilihat dari rentang usia adalah responden di atas 55 tahun, sedangkan profil responden keseluruhan didominasi pada usia 25-29 tahun. Demikian pula jika dilihat dari sisi mata pencaharian, profil responden didominasi oleh swasta/ pegawai swasta, dan dalam indeks toleransi swasta/pegawai swasta adalah 3.34. Selanjutnya tingkat pendidikan, indeks toleransi responden yang memiliki tingkat pendidikan SLTA adalah 3.35, dan 53% responden adalah lulusan SLTA. Demikian pula dari sisi tingkat penghasilan, responden yang berpenghasilan di bawah 1 juta per bulan memiliki indeks toleransi 3.28, sedangkan jumlah mereka dalam sampel keseluruhan sebesar 56.9 %.



Penutup

Mengacu pada beragam informasi yang berhasil dihimpun, setelah dianalisis dan diinterpretasi, kemudian diambil beberapa kesimpulan yang bersifat pokok yang dianggap penting, bersifat umum dan menyeluruh berikut ini.

Kesimpulan

1. Kondisi kerukunan di 12 wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur pada umumnya, dipandang relatif kondusif. Dalam artian, sekarang ini tidak ada konflik atau benturan-benturan sosial yang bersifat terbuka. Hasil wawancara di atas, dikuatkan dengan hasil penyebaran kuesioner yang mendapatkan angka penilaian responden sebesar (3,58) dengan menggunakan skala penilaian dari 1 sampai 5, atau rentang skor antara 1-5, dapat dikategorikan berada di tingkat rukun.
2. Beberapa faktor yang dipandang potensial bagi upaya perwujudan kerukunan meliputi: 1) Kearifan lokal; 2) Ajaran agama dan peran para tokoh agama selaku lambang pemersatu; 3) Dukungan politis pemerintah untuk mewujudkan kerukunan; 4) Saling ketergantungan antar warga dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup keseharian; 5) Adanya forum-forum dialog multikultural lintas agama, budaya, etnis, melalui berbagai media. Sementara aspek-aspek yang dapat

- mengganggu kerukunan, seperti: 1) Pembangunan dan penggunaan rumah ibadat yang tidak sesuai dengan peraturan; 2) Persaingan politik yang kurang sehat dan penyalahgunaan simbol keagamaan untuk kepentingan kelompok; 3) Perbedaan paham dan pengamalan agama yang tidak sesuai dengan kelompok arus utama; 4) Kesenjangan sosial ekonomi; 5) Perkembangan budaya global yang tidak selaras dengan kearifan lokal dan ajaran agama.
3. Sejumlah kasus yang pernah muncul antara lain: 1) Kasus protes dan penolakan pembangunan atau penggunaan rumah ibadat; 2) Kelompok agama yang mengusung paham yang tidak sesuai dengan paham agama kelompok arus utama; 3) Penistaan/penodaan agama; 4) Penyiaran agama yang ditujukan kepada kelompok agama, yang melibatkan massa; 6) Kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
 4. Langkah-langkah penyelesaian kasus konflik yang lazim dilakukan meliputi: 1) Musyawarah secara kekeluargaan antar pihak-pihak terkait; 2) Proses dialog intensif antar para tokoh keagamaan dan pemerintah; 3) Proses hukum melalui pengadilan; 4) Diserahkan pada pemerintah setempat.

Rekomendasi

Untuk menjaga dan meningkatkan kerukunan hidup umat dan keutuhan bangsa, perlu dilakukan upaya-upaya: 1) Peningkatan efektifitas fungsi lembaga-lembaga kearifan lokal dan keagamaan masyarakat; 2) Peningkatan wawasan keagamaan masyarakat; 3) Menggalakkan kerjasama sosial kemanusiaan lintas agama, budaya, etnis dan profesi 4) Meningkatkan peran FKUB; 5) Memperkaya wawasan dan pengalaman tentang kerukunan melalui program kurikuler di lingkungan lembaga pendidikan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, Mursyid dan Choirul Fuad, *Peta Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat : 2005
- Aly, Abdullah at.al. *Pendidikan Perdamaian Berbasis Islam*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah, 2009.
- Amstrong, Karen, *Berperang Demi Tuhan*. Bandung: Mizan, 2001.
- Balitbang Agama, *Sistem Siaga Dini*, Untuk Kerusakan Sosial, 1999.
- Badan Pusat Statistik, *Jawa Timur Dalam Angka*, 2009.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. LP3ES, 1990.
- Fedyani, Achmad, *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham dalam Ajaran Islam*, Jakarta: Rajawali 1986.
- Sill, David L (ed).. *International and Schuster and Prentice Hall International*, London, 1968. P.168.
- Mudzhar, Atho, *Konflik Etnis Religius Indonesia Kontemporer*. Balitbang dan Diklat, Departemen Agama, 2002.
- Mujani, Saiful, *Masalah Toleransi Antar Agama*. Lembaga Survei Indonesia, 2006.
- Purwasito, Andrik, *Komunikasi Multikultural*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah , 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta UI Press, 1969.
- Sutarto, Ayu, *Kompas*, 11 Maret 2009
- Turmudi, Endang, *Perselingkuhan Kyai dan Kekuasaan*. LKIS, 2003.